

LANDASAN KONSEPTUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

**PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL
DENGAN PENDEKATAN NEO-VERNAKULAR
DI KAPUAS HULU**



DISUSUN OLEH:
STEFALIS YORISKA YOGI
15 01 16095

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

LEMBAR PENGABSAHAN

LANDASAN KONSEPTUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR DI KAPUAS HULU

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

STEFALIS YORISKA YOGI

NPM : 15 01 16095

Telah diperiksa dan dievaluasi dan dinyatakan lulus dalam penyusunan
Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur
pada Program Studi Arsitektur
Fakultas Teknik – Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta, 01 - 07 - 2020

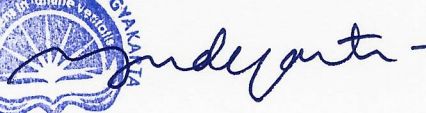
Dosen Pembimbing



Ir. Soesilo Boedi Leksono, M.T.

Ketua Program Studi Arsitektur




Ir. Anna Pudianti, M.Sc

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : Stefalis Yoriska Yogi

NPM : 15 01 16095

Dengan sungguh-sungguhnya dan atas kesadaran sendiri,

Menyatakan bahwa:

Hasil karya Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur —yang berjudul:

**PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR DI KAPUAS HULU**

benar-benar hasil karya saya sendiri.

Pernyataan, gagasan, maupun kutipan—baik langsung maupun tidak langsung—yang bersumber dari tulisan atau gagasan orang lain yang digunakan di dalam Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini telah saya pertanggungjawabkan melalui catatan perut atau pun catatan kaki dan daftar pustaka, sesuai norma dan etika penulisan yang berlaku.

Apabila kelak di kemudian hari terdapat bukti yang memberatkan bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruh hasil karya saya yang mencakup Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di kalangan Program Studi Arsitektur – Fakultas Teknik – Universitas Atma Jaya Yogyakarta; gelar dan ijazah yang telah saya peroleh akan dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian, Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguhnya, dan dengan segenap kesadaran maupun kesediaan saya untuk menerima segala konsekuensinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Yang menyatakan,



Stefalis Yoriska Yogi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunianya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul – **Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular di Kapuas Hulu** – sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Ign. Purwanto Hadi, MSP, selaku dosen pembimbing seminar LKPPA.
2. Kedua orang tua serta saudara/i penulis yang telah memberikan dukungan dan doannya kepada penulis.
3. Teman-teman, sahabat dan kerabat yang sudah membantu dan mendukung atas selesainya penulisan ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Stefalis Yoriska Yogi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGABSAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek.....	1
.....	1
1.2 Latar Belakang Permasalahan	5
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Sasaran	7
1.4.1 Tujuan	7
1.4.2 Sasaran	7
1.5 Lingkup Studi.....	7
1.5.1 Materi Studi.....	7
1.6 Metode Penulisan	8
1.6.1 Pola Prosedural	8
1.6.2 Teknik Pengamatan	8
1.6.3 Tata Langkah.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PASAR TRADISIONAL	12
2.1 Tinjauan Umum	12
2.1.1 Pengertian Pasar	12
2.1.2 Jenis Pasar	13
2.1.2.1 Pasar Menurut Jenis Kegiatannya	13
2.1.2.2 Pasar Ditinjau Dari Segi Fisik.....	14
2.1.2.3 Pasar Ditinjau Dari Segi Dagangannya	14
2.1.2.4 Pasar Menurut Luas Wilayah Kegiatannya.....	15
2.2 Tinjauan Khusus	15
2.2.1 Pengertian Pasar Tradisional	15

2.2.2	Ciri-ciri Pasar Tradisional	16
2.2.3	Potensi Pasar Tradisional	17
2.2.4	Klasifikasi Pasar Tradisional.....	17
2.2.4.1	Klasifikasi Pasar Menurut Peraturan Daerah	17
2.2.5	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar.....	18
2.2.5.1	Pembangunan Baru	18
2.2.5.2	Perluasan Pasar	19
2.2.5.3	Renovasi Bangunan Utama.....	20
2.2.6	Komponen Pasar Tradisional	21
2.2.6.1	Pelaku Kegiatan	21
2.2.6.2	Obyek Kegiatan.....	22
2.2.7	Fasilitas Pasar Tradisional.....	25
2.2.7.1	Fasilitas Fisik	25
2.2.7.2	Fasilitas Non-Fisik	26
2.2.8	Persyaratan Pasar Tradisional	26
2.2.8.1	Persyaratan Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.....	26
2.2.8.2	Persyaratan Berdasarkan Petunjuk Teknis Sarana Perdagangan.....	32
2.2.8.3	Persyaratan Pasar Rakyat	36
2.2.9	Standar Sarana Prasarana Pasar Tradisional	41
	42
	BAB III.....	46
	TINJAUAN WILAYAH DAN KAWASAN	46
3.1	Kondisi Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	46
3.1.1	Kondisi Admisnistratif.....	46
3.1.2	Kondisi Geografis	48
3.1.2.1	Letak Wilayah.....	48
3.1.2.2	Topografi.....	48
3.1.3	Kondisi Klimatologis	48
3.1.4	Kondisi Sosial Budaya	51
3.1.4.1	Kependudukan	51
3.1.4.2	Pendidikan.....	52
3.1.4.3	Kesehatan.....	53
3.1.4.4	Keagamaan.....	53
3.1.4.5	Mata Pencaharian.....	53
3.1.5	Fisik Prasarana Daerah.....	54
3.1.5.1	Sistem Tata Ruang Wilayah.....	54

3.1.5.2	Sistem Transportasi / Perangkutan Wilayah	58
3.1.5.3	Sistem Pelayanan Komunikasi Dan Informasi.....	64
3.1.5.4	Sistem Pelayanan Energi.....	65
3.1.5.5	Sistem Pelayanan Air Bersih.....	67
BAB IV	69
TINJAUAN TEORI PERANCANGAN	69
4.1	Tinjauan Tata Ruang Luar dan Ruang Dalam.....	69
4.1.1	Ruang Luar.....	69
4.1.2	Ruang Dalam.....	71
4.2	Tinjauan Arsitektur Neo Vernakular.....	72
4.2.1	Pengertian Arsitektur Neo Vernakular.....	72
4.2.2	Sejarah Arsitektur Neo Vernakular.....	73
4.2.3	Prinsip Desain	76
4.2.4	Kriteria Arsitektur Neo Vernakular	77
4.2.5	Perbedaan Arsitektur Tradisional, Vernakular dan Neo Vernakular	77
4.2.6	Ciri-ciri Arsitektur Neo Vernakular	78
BAB V	80
ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN	80
5.1	Analisis Perencanaan	80
5.1.1	Analisis Perencanaan	80
5.1.2	Analisis Komoditi	80
5.1.3	Analisis Pelaku.....	81
5.1.4	Analisis Pola Kegiatan	83
5.1.5	Analisis Kebutuhan Ruang Pasar	85
5.1.6	Besaran Ruang Pasar.....	88
5.1.7	Analisis Persyaratan Ruang.....	93
5.1.8	Analisis Hubungan Ruang.....	95
5.2	Analisis Perancangan	98
5.2.1	Analisis Pemilihan Tapak	98
5.2.2	Analisis Tapak dan Lokasi Eksisting Tapak	101
5.2.2.1	Analisa Fungsional.....	101
5.2.2.2	Analisa Pencapaian Site	102
5.2.2.3	Sirkulasi	104
5.2.2.4	View & Orientasi Site	105
5.2.2.5	Kebisingan	108
5.2.2.6	Garis Lintasan Matahari.....	110

5.2.2.7	Penzoningan	111
5.2.3	Analisis Wujud Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular.....	113
5.2.4	Analisis Perancangan Struktur dan Konstruksi	118
5.2.5	Analisis Perancangan Utilitas Bangunan	120
5.2.4.1	Sistem Jaringan Air Bersih	120
5.2.4.2	Sistem Jaringan Air Kotor.....	121
5.2.4.3	Sistem Jaringan Air Hujan	122
5.2.4.4	Sistem Jaringan Listrik.....	123
5.2.4.5	Sistem Proteksi Kebakaran dan Sistem Keamanan.....	123
5.2.4.6	Sistem Persampahan	124
BAB VI	125
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL	125
6.1	Konsep Perencanaan	125
6.1.1	Konsep Programatik.....	125
6.1.1.1	Konsep Sistem Lingkungan	125
6.1.1.2	Konsep Konteks Kultural.....	125
6.1.1.3	Konsep Konteks Fisikal	125
6.1.2	Konsep Sistem Manusia.....	125
6.1.2.1	Konsep Sasaran Pengguna	125
6.1.2.2	Konsep Persyaratan Pengguna	126
6.1.3	Konsep Perencanaan Tapak	138
6.1.4	Konsep Tata Ruang Bangunan.....	140
6.1.5	Konsep Penekanan Studi.....	142
6.1.5.1	Konsep Ruang Dalam	143
6.1.5.2	Konsep Ruang Luar	144
6.1.5.3	Konsep Pencahayaan.....	146
6.1.5.4	Konsep Penghawaan	148
6.1.5.5	Konsep Transformasi Arsitektur Neo Vernakular	150
6.2	Konsep Perancangan	157
6.2.1	Konsep Perancangan Struktur dan Konstruksi.....	157
6.2.2	Konsep Perancangan Utilitas Bangunan	158
6.2.2.1	Sistem Jaringan Listrik.....	158
6.2.2.2	Sistem Jaringan Telekomunikasi.....	159
6.2.2.3	Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Kotor	159
6.2.2.4	Sistem Penanggulangan Kebakaran	161

6.2.2.5	Sistem Keamanan.....	162
6.2.2.6	Sisteam Distribusi Persampahan.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....		165



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Admisnistrasi Kabupaten Kapuas Hulu	1
Gambar 1. 2 Data Jumlah Pasar Tanpa Bangunan di Kalimantan Barat	3
Gambar 1. 3 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Kpuas Hulu Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017.....	4
Gambar 2. 1 Standar Tubuh Fungsional	41
Gambar 2. 2 Standar Dimensi Tubuh Fungsional.....	42
Gambar 2. 3 Standar Ruang Untuk Pengguna Kursi Roda	42
Gambar 2. 4 Standar Ruang Untuk Pengguna Alalt Bantu Jalan.....	42
Gambar 2. 5 Standar Sirkulasi.....	43
Gambar 2. 6 Standar Perabot Pada Display Kios	43
Gambar 2. 7 Standar Perabot Pada Display Kios	44
Gambar 2. 8 Standar Trolley	44
Gambar 2. 9 Standar Perabot Pada Display Los.....	44
Gambar 2. 10 Standar Sirkulasi Pada Display Los	45
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	46
Gambar 4. 1 Ruang yang dibatasi oleh elemen alam.....	70
Gambar 4. 2 Ruang Hidup dan Ruang Mati.....	70
Gambar 4. 3 Ruang yang dibatasi oleh bangunan.....	71
Gambar 5. 1 Alur kegiatan Pedagang	84
Gambar 5. 2 Alur Kegiatan Pemasok Barang	84
Gambar 5. 3 Alur Kegiatan Pengelola Pasar	85
Gambar 5. 4 Alur Kegiatan Pengunjung Pasar	85
Gambar 5. 5 Hubungan Antar Ruang Keseluruhan	95
Gambar 5. 6 Hubungan Ruang Zona Perdagangan.....	96
Gambar 5. 7 Hubungan Antar Ruang Zona Pendukung	97
Gambar 5. 8 Hubungan Antar Ruang Zona Pengelola.....	97
Gambar 5. 9 Hubungan Antar Ruang Zona Servis.....	98
Gambar 5. 10 Peta Kawasan Site.....	99
Gambar 5. 11 Peta RTRW Kabupaten Kapuas Hulu	100

Gambar 5. 12 Peta Eksisting Site.....	101
Gambar 5. 13 Pencapaian Site	103
Gambar 5. 14 Respon Pencapaian Site	104
Gambar 5. 15 Respon Sirkulasi.....	105
Gambar 5. 16 View Keluar Site	106
Gambar 5. 17 Respon View Keluar Site	106
Gambar 5. 18 View Ke Dalam Site.....	107
Gambar 5. 19 Respon View Ke Dalam Site.....	108
Gambar 5. 20 Analisis Kebisingan	109
Gambar 5. 21 Analisis Garis Lintasan Matahari.....	110
Gambar 5. 22 Kegiatan untuk zonafikasi.....	112
Gambar 5. 23 Penzoningan	113
Gambar 5. 24 Sistem Jaringan Air Bersih.....	120
Gambar 5. 25 Sistem Jaringan Air Kotor.....	122
Gambar 5. 26 Sistem Jaringan Air Hujan	122
Gambar 5. 27 Sistem Jaringan Listrik.....	123
Gambar 6. 1 Struktur Organisasi Pengelola Pasar	130
Gambar 6. 2 Konsep Organsisasi Ruang Makro Pasar	138
Gambar 6. 3 Kondisi Kawasan Eksisting Site	138
Gambar 6. 4 Kondisi Eksisting Site	139
Gambar 6. 5 Zona Bangunan Pasar.....	139
Gambar 6. 6 Konsep Tatanan Massa	141
Gambar 6. 7 Tata Ruang Bangunan Pasar	141
Gambar 6. 8 Konsep Sirkulasi di dalam Pasar	142
Gambar 6. 9 Pondasi Foot Plat	157
Gambar 6. 10 Struktur Kolom & Balok Beton Bertulang.....	158
Gambar 6. 11 Struktur Atap Rangka Baja	158
Gambar 6. 12 Konsep Sistem Jaringan Kelistrikan	159
Gambar 6. 13 Konsep Jaringan Air Bersih	159
Gambar 6. 14 Jaringan Air Bersih	160
Gambar 6. 15 Jaringan Air Kotor.....	161
Gambar 6. 16 Sistem Penanggulangan Kebakaran	162
Gambar 6. 17 Sistem Keamanan.....	163

Gambar 6. 18 Konsep Jaringan Distribusi Persampahan 163
Gambar 6. 19 Jaringan Distribusi Persampahan 164



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Pedagang Pasar	22
Tabel 2. 2 Pengelompokan Objek Kegiatan Pasar Tradisional.....	24
Tabel 2. 3 Ketentuan Jumlah Kamar Mandi Pasar Tradisional	31
Tabel 2. 4 Persyaratan pasar rakyat berdasarkan tipe	38
Tabel 2. 5 Persyaratan Teknis Pasar Rakyat	38
Tabel 2. 6 Lanjutan	39
Tabel 2. 7 Lanjutan	40
Tabel 2. 8 Persyaratan Pengelolaan Pasar Rakyat	40
Tabel 2. 9 Lanjutan	41
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dirinci per Kecamatan.....	47
Tabel 3. 2 Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan	50
Tabel 4. 1 Perbedaan Arsitektur Modern, Late Modern dan Post Modern	76
Tabel 4. 2 Tabel Perbedaan Arsitektur Tradisional,	78
Tabel 5. 1 Analisis Komoditi Pasar	81
Tabel 5. 2 Jumlah pengelola pasar	83
Tabel 5. 3 Kebutuhan Ruang Fungsi Perdagangan/Primer	86
Tabel 5. 4 Kebutuhan Ruang Fungsi Pengelolaan/Sekunder	87
Tabel 5. 5 Kebutuhan Ruang Fungsi Penunjang	87
Tabel 5. 6 Kebutuhan Ruang Fungsi Servis.....	88
Tabel 5. 7 Analisis Besaran Ruang Zona Perdagangan	90
Tabel 5. 8 Analisis Besaran Ruang Zona Penunjang	90
Tabel 5. 9 Analisis Besaran Ruang Zona Pengelola	91
Tabel 5. 10 Analisis Besaran Ruang Zona Servis	92
Tabel 5. 11 Analisis Persyaratan Ruang Pasar	94
Tabel 5. 12 Analisis Wujud Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular	118
Tabel 6. 1 Jumlah pengelola pasar	126
Tabel 6. 2 Kebutuhan Ruang Pengguna Pasar	131
Tabel 6. 3 Perencanaan Fasilitas di dalam Pasar.....	134

Tabel 6. 4 Besaran Ruang Dalam Pasar.....	135
Tabel 6. 5 Konsep Ruang Dalam Pasar.....	143
Tabel 6. 6 Konsep Ruang Luar Pasar.....	144
Tabel 6. 7 Konsep Pencahayaan di dalam Pasar	146
Tabel 6. 8 Konsep Penghawaan di dalam Pasar.....	148
Tabel 6. 9 Konsep Transformasi Arsitektur Neo Vernakular	151



ABSTRAK

Kapuas Hulu merupakan daerah tingkat II/kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Barat sekaligus berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Merupakan cerminan serta barometer keberhasilan pembangunan Republik Indonesia di mata Internasional. Kondisi ini berpengaruh pada sektor ekonomi perdagangan dan pembangunan daerah, agar terus berbenah diri untuk terus meningkatkan aksesibilitas pada pemanfaatan serta pengembangan ekonomi secara lebih optimal. Salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang dirasa penting ialah pembangunan pasar tradisional.

Perencanaan dan perancangan Pasar Tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan di dalam wilayah Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana diharapkan dapat meningkatkan kualitas Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kawasan Wilayah Timur Kalimantan Barat dalam memacu pertumbuhan pembangunan di Kalimantan Barat terutama dari segi perdagangan dan jasa.

Pendekatan desain arsitektur neo vernakular diterapkan pada fasad bangunan dengan mengambil elemen pembentuk fasad arsitektur tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu rumah adat dayak atau rumah panjae/betang. Disamping itu, pembangunan pasar tradisional ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang agar dapat memenuhi kebutuhan semua pelaku di dalam pasar.

Kata Kunci : *Pembangunan Pasar Tradisional, Kabupaten Kapuas Hulu, Arsitektur Neo Vernakular*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek



Gambar 1. 1 Peta Admistrasi Kabupaten Kapuas Hulu

Kapuas Hulu merupakan daerah tingkat II/kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Barat sekaligus berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Merupakan cerminan serta barometer keberhasilan pembangunan Republik Indonesia di mata Internasional¹. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 29.842 Km², memiliki beragam potensi baik dari segi sumber daya alamnya maupun dari segi sumber daya manusia. Secara geologis Kabupaten Kapuas Hulu berada di ujung timur provinsi Kalimantan Barat, dengan jarak lebih kurang 657 km jalan darat dan 824 km melalui jalur sungai kapuas. Kondisi ini berpengaruh pada sektor ekonomi perdagangan dan pembangunan daerah, agar terus berbenah diri untuk terus meningkatkan aksesibilitas pada pemanfaatan serta pengembangan ekonomi secara lebih optimal. Melalui visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”².

¹ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan, Data Base Pertanian, 2017, hal 1

² <https://www.dislingkunganhidup.kapuashulukab.go.id/profile/visi-misi-bupati-kapuas-hulu/> dikutip Kamis, 14 November 2019 pukul 13.43

Diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diprioritaskan agar dapat mendukung perekonomian di wilayah provinsi Kalimantan Barat. (pemdakh, 2016).

Salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang dirasa penting ialah pembangunan pasar tradisional. Dalam penerapannya, pasar tradisional banyak melibatkan orang saat proses bertransaksi dimana terdapat banyak pembeli dan penjual. Proses transaksi yang terjadi di dalam pasar tradisional berputar dari satu individu ke individu lainnya yang secara langsung dapat membantu ekonomi bagi banyak pedagang. Semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin banyak pula pengangguran yang terselamatkan. Apabila jumlah pengangguran dapat ditekan, maka pendapatan perkapita akan naik serta pemasukan dana ke pemerintah juga akan meningkat dan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional jauh lebih berperan dalam membangun perekonomian.

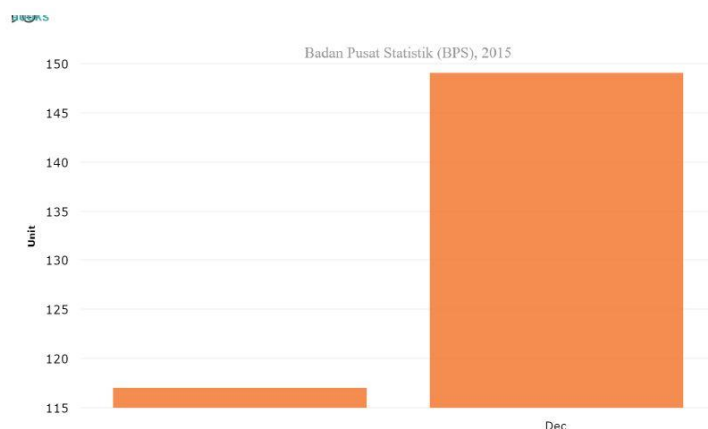
Menurut data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) menyebutkan di Indonesia sendiri jumlah pasar tradisional menurun drastis dari 13.540 menjadi 9.950 pasar dalam waktu 4 tahun (2007-2011). Pada tahun 2011 terdapat 144 pasar terkena konflik akibat revitalisasi dan 161 pasar hangus karena kebakaran. Data Kementerian Perindustrian 2007 menyebutkan, jumlah pasar tradisional mencapai 13.750 pasar, Sedangkan merujuk data Kementerian Perdagangan 2011, dari sekitar 9.950 pasar tradisional, sebanyak 3.800 di antaranya telah lenyap. Pasar rakyat tumbuh melambat -8,1% sementara pasar modern tumbuh 31,4% (KoranSindo, 2018).

Menurut data Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), pada 2010 masih terdapat sekitar 9.000 pasar yang bangunannya sudah tua dan lebih dari 20 tahun tidak tersentuh renovasi. Sebanyak 70% dari 13.000 bangunan pasar sudah berumur lebih dari 20 tahun. Berdasarkan data dari lembaga rating AC Nielsen, pertumbuhan pasar modern di Indonesia mencapai 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut hingga 8% per tahun. Dari sisi pangsa pasar, pasar tradisional masih mendapat 80% di tahun 2009 dan pasar modern mendapat

20%. Untuk tahun 2010 - 2015 pangsa pasar modern meningkat menjadi 30% sampai 37%, sedangkan pasar tradisional mengecil menjadi 70% sampai 63%.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, jumlah pasar tanpa bangunan di Kalimantan Barat 2011 – 2014 yaitu sebanyak 149 unit. Ini menunjukkan bahwa pembangunan khususnya pada sektor perdagangan seperti pembangunan pasar baik itu pasar daerah maupun lokal sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu (databooks, 2015).

Jumlah Pasar tanpa Bangunan, Pasardi Kalimantan Barat 2011 - 2014



Gambar 1. 2 Data Jumlah Pasar Tanpa Bangunan di Kalimantan Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017, pada tahun 2012 hingga 2016 ada peningkatan pembangunan sarana perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu peningkatan jumlah pasar yang tadinya ada 21 ditahun 2012 menjadi 25 ditahun 2016. Peningkatan jumlah kios dalam pasar yang mana pada tahun 2012 ada 116 buah menjadi 146 buah bangunan kios dalam pasar. Peningkatan jumlah lapak dalam pasar yang tadinya 88 buah lapak ditahun 2012 menjadi 310 lapak ditahun 2016. Untuk jumlah toko di pasar tidak mengalami peningkatan yang mana masih berkisar diangka 68 buah bangunan. Nyatanya hingga sekarang perkembangannya meningkat tajam terutama pada jumlah pasar lokal serta kios dan lapak yang ada di dalam pasar, dan telah memicu berbagai interaksi serta pola hubungan persaingan ekonomi. Dengan kedua

data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan pembangunan pasar sudah semakin baik terutama pada pengurangan jumlah pasar tanpa bangunan.

Menyikapi data tersebut, harus ada peningkatan fasilitas serta kelebihan-kelebihan lainnya pada pasar tradisional sehingga dapat meningkatkan daya saing agar tetap berdiri dan berkembang dalam derasnya persaingan dunia ritel. Termasuk diantaranya adalah mengangkat kembali nilai-nilai dasar pasar tradisional sebagai budaya yang khas dan ruang sosial, peningkatan mutu pelayanan yang baik, penambahan jam operasional pasar, serta fungsi yang lebih fleksibel.

Tabel 7.3. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Kapuas Hulu, 2012 - 2016
Table *Number of Trade Facilities by Type in Kapuas Hulu District, 2012 - 2016*

Badan Hukum	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pasar	21	22	24	24	25
Kios dalam Pasar	116	136	146	146	146
Lapak dalam Pasar	88	136	184	278	310
Toko di Pasar	68	68	68	68	68

Sumber/source : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Gambar 1. 3 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Kpuas Hulu
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017

Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional di Kapuas Hulu sendiri sudah menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (TribunKapuasHulu, 2019). Dikarenakan pasar lokal yang ada di Putussibau, ibukota Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kebakaran yang menghanguskan seluruh bagian pasar tersebut. Kebakaran yang terjadi memaksa para pedagang

memindahkan pusat perdagangan ke daerah lain yaitu di kawasan pasar pagi yang berada tidak jauh dari lokasi pasar yang terbakar. Lokasi pasar yang berada di kawasan pasar pagi yang digunakan saat ini untuk kepentingan jual beli juga sudah tidak dapat dipertahankan. Banyaknya permasalahan yang terjadi baik dari segi geografis maupun penataan yang kurang baik, serta minimnya fasilitas dan lahan parkir menjadikan alasan kuat perencanaan kembali pembangunan pasar tradisional di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

Mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, maka perencanaan proyek pembangunan pasar tradisional di Kapuas Hulu perlu dilakukan guna memprioritaskan serta mengangkat pasar tradisional sebagai penggerak perekonomian daerah. Pemilihan lokasi proyek di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di kota Putussibau dinilai strategis untuk perkembangan ekonomi bagi kawasan tersebut. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kawasan cerminan dan barometer keberhasilan pembangunan serta keberhasilan dari segi ekonomi perdagangan dan jasa di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.

1.2 Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya pasar tradisional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian daerah. Keberadaan pasar tradisional berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pedagang. Pasar daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dan pembeli yang datang baik dari luar maupun dari dalam daerah.

Upaya perancangan Pasar Tradisional di Kapuas Hulu kiranya dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada pasar tersebut. Dengan perumusan konsep perancangan fisik berdasarkan standar (SNI pasar Rakyat) dan efektivitas penataan ruang yang disesuaikan dengan aktivitas pengguna pasar serta pendekatan arsitektur neo-vernakular. Fasilitas yang ada juga lebih dikembangkan lagi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna pasar. Pasar tradisional ini dipastikan akan menjadi sentral perdagangan pendukung perekonomian provinsi Kalimantan Barat, mengingat kebutuhan perencanaan proyek pasar tradisional sebagai penggerak

perekonomian daerah.

Ada dua sisi yang dapat ditinjau pada pengolahan pasar tradisional, yaitu sisi fisik dan non fisik. Dari sisi fisik yaitu aspek bangunan dan infrastruktur, sedangkan dari sisi non fisik yaitu aspek manajemen pengolahan pasar.

Ditinjau dari aspek bangunan, pengolahan kawasan harus memperhatikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pelaku kegiatan karena jenis bangunan yang akan dibangun ialah bangunan komersial. Arsitektur bangunan harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekitar dengan mempertimbangkan perwujudan kualitas bangunan dan lingkungan. Bangunan harus dapat mencirikan identitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga tidak ada pemisah keterikatan antara bangunan dengan lingkungannya.

Dari aspek infrastruktur, perencanaan dan pengolahan sistem sanitasi dan drainase menjadi penting untuk diperhatikan dalam pembangunan karena salah satu permasalahan utama bagi pasar tradisional ialah stigma kotor dan kumuh yang disebabkan oleh buruknya pengolahan limbah seperti sistem sanitasi dan drainase. Selain itu kendala pada aksesibilitas pasar juga menjadi hal penting juga untuk diperhatikan. Kemacetan yang sering terjadi pada pasar dapat menghambat mobilitas masyarakat untuk menuju pasar yang dapat mengganggu aktivitas pasar tersebut. Perancangan sirkulasi dapat menunjang kegiatan dan nyaman di dalam pasar dengan perencanaan akses sirkulasi di dalam pasar yang dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan. Pemisahan arus sirkulasi distribusi keluar masuk barang dagangan menjadi hal yang dapat menunjang kenyamanan sirkulasi. Perancangan fasilitas penunjang bagi pelaku pasar seperti ATM, P3K, toilet, tempat ibadah, tempat parkir kendaraan yang memadai juga harus diperhatikan untuk mempermudah dan memberikan kesan nyaman dalam berkegiatan di dalam pasar.

Pada penerapannya, perencanaan dan perancangan pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan konsep pendekatan Neo Vernakular sebagai konsep perancangan wujud fasad agar tetap dapat merepresentasikan bentuk arsitektur lokal yang dikembangkan menjadi lebih modern sehingga dapat diterima pada era sekarang dan yang akan datang.

Pembangunan pasar tradisional ini pada prinsipnya mengambil kaidah-kaidah normative, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan antara bangunan, alam dan lingkungan.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan Pembangunan Pasar Tradisional di Kapuas Hulu yang efektif dari segi penataan ruang dalam dan ruang luar berdasarkan standar (SNI pasar Rakyat) yang disesuaikan pada aktivitas pengguna pasar dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular ?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Pembangunan Pasar Tradisional di Kapuas Hulu yang efektif dari segi penataan ruang dalam dan ruang luar berdasarkan standar (SNI pasar Rakyat) yang disesuaikan pada aktivitas pengguna pasar dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular.

1.4.2 Sasaran

- a. Tersusunnya konsep perencanaan dan perancangan pembangunan pasar tradisional yang efektif dari segi tatanan ruang dalam dan ruang luar berdasarkan standar (SNI pasar Rakyat)
- b. Terciptanya wujud pasar tradisional yang berorientasi pada efektifitas penataan ruang yang disesuaikan pada aktivitas pengguna pasar.
- c. Terciptanya pasar tradisional yang berkonsep pada pendekatan neo-vernakular yang diwujudkan melalui desain fasad bangunan.
- d. Terciptanya ruang publik untuk dinikmati oleh semua orang.

1.5 Lingkup Studi

1.5.1 Materi Studi

- a. Lingkup Spasial

Lingkup spasial perencanaan dan perancangan Pasar Tradisional di Kabupaten

Kapuas Hulu mencakup kawasan di Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu

b. Lingkup Subtansial

Penekanan obyek studi perencanaan dan perancangan pasar tradisional di Kapuas Hulu adalah penataan tata ruang baik dalam maupun luar, desain fasad bangunan, serta tapak bangunan.

c. Lingkup Temporal

Perencanaan dan perancangan obyek studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk jangka waktu hingga 10 tahun mendatang.

1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Pola Prosedural

Pola prosedural penalaran deskriptif menjadi pola yang digunakan dalam penulisan studi ini. Yang mana pola prosedural penalaran deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan subyek serta obyek studi berdasarkan data yang diperoleh atau sebagaimana adanya. Metode pendekatan deskriptif ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut, sehingga memberikan kemungkinan strategi untuk pemecahan masalah.

1.6.2 Teknik Pengamatan

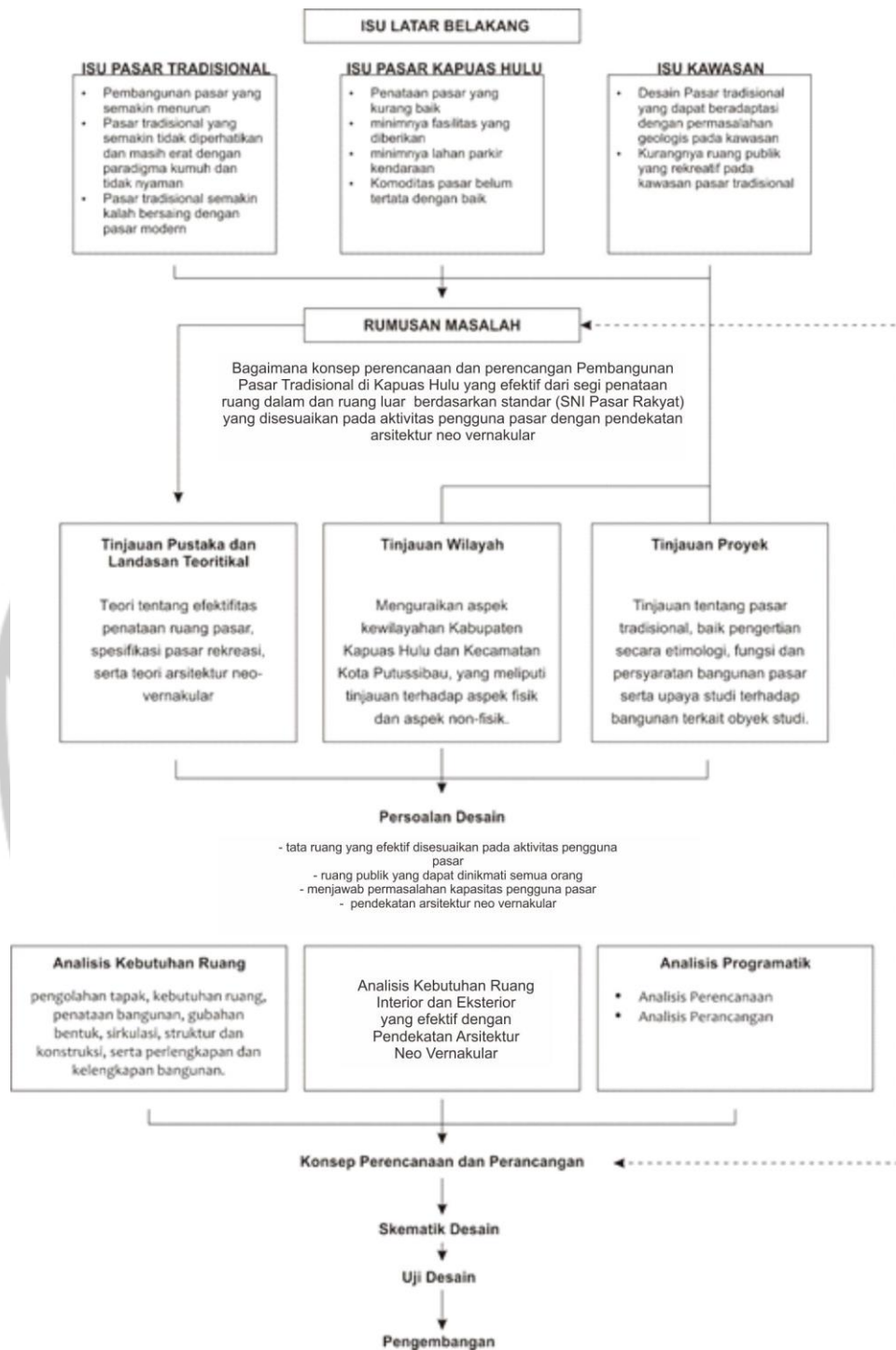
a. Studi Pustaka

Mengumpulkan informasi dari buku-buku dan referensi yang terkait pada objek pembahasan.

b. Metode Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung pada obyek studi untuk mendapatkan data kondisi nyata dari obyek studi tersebut.

1.6.3 Tata Langkah



1.7 Sistematika Penulisan

Bab I

Pendahuluan

Bab ini menyajikan uraian yang berkenaan dengan latar belakang pengadaan proyek pasar, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, lingkup studi, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Pasar Tradisional

Bab ini menguraikan tinjauan tentang pasar tradisional, baik pengertian secara etimologi, fungsi dan persyaratan bangunan pasar serta upaya studi terhadap bangunan terkait obyek studi.

Bab III

Tinjauan Wilayah

Bab ini menguraikan aspek kewilayahan Kabupaten Kapuas Hulu, yang meliputi tinjauan terhadap aspek fisik dan aspek non-fisik.

Bab IV

Tinjauan Teori Perancangan

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai tinjauan tata ruang luar dan ruang dalam serta teori arsitektur neo-vernakular sebagai landasan konsep pendekatan yang diambil dalam perencanaan dan perancangan.

Bab V

Analisis Perencanaan dan Perancangan

Bab ini menguraikan analisis yang mencakup konsep perencanaan dan perancangan dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular, pengolahan tapak, kebutuhan ruang, penataan bangunan, gubahan bentuk, sirkulasi, struktur dan konstruksi, serta perlengkapan dan kelengkapan bangunan.

Bab VI

Konsep Perencanaan dan Perancangan

Bab ini menjabarkan skematik konsep perencanaan dan perancangan Pasar Tradisional di Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang mencakup konsep perencanaan dan perancangan dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular, konsep lansekap, konsep penataan bangunan, konsep gubahan bentuk bangunan, konsep sirkulasi bangunan, konsep struktur dan konstruksi, serta konsep perlengkapan dan kelengkapan bangunan.

Daftar Pustaka



BAB II

TINJAUAN PASAR TRADISIONAL

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya³.

Menurut definisi lama ahli ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli (baik barang maupun jasa). Di dalamnya (pasar) terdapat penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi, yaitu suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Suatu transaksi memiliki syarat yang semuanya harus dipenuhi, yaitu: (a) ada barang yang diperjual belikan, (b) ada pedagang dan pembeli, (c) ada kesepakatan harga barang dan (d) tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Menurut tata cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern⁴.

Pengertian pasar menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo dalam bukunya yang berjudul: *Pengantar Bisnis Modern*, menyatakan:⁵

“Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak (pembeli dan penjual), mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 th. 2007

⁴ Yoga Setiawan, Gambaran Umum Pasar Tradisional, www.yogas09.student.ipb.ac.id, posting : 22 mei 2011, diakses : 14 November 2019, 14:10 WIB.

⁵ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 23

ekonomi produksi atau pedagang”.

Sedangkan menurut Runis Nisa dalam kajiannya yang berjudul: Observasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, menyatakan⁶:

“Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan”.

Secara sederhana, arti dari pasar adalah tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa. Dalam arti yang lebih luas, pasar adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan keberadaan produk barang atau jasa dengan alat tukar berupa uang atau dengan alat tukar lainnya sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam konteks perekonomian pasar menurut W.J. Stanton adalah sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (disposable income) serta kemauan untuk membelanjakannya⁷.

2.1.2 Jenis Pasar⁸

2.1.2.1 Pasar Menurut Jenis Kegiatannya

- Pasar Modern

⁶ Runis Nisa, *Observasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, www.runisnisa.blogspot.com, posting : Selasa, 26 Maret 2013, 07:12 WIB, diakses 14 November 2019, 14:16 WIB

⁷ Hari Waluyo, *Sosialisasi Pasar Tradisional Sebagai Aset Wisata Budaya di Lampung*, www.budpar.go.id, diakses : 14 Nov. 19, 14:21 WIB

⁸ Bintoro, S. (2016). *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta : universitas Atma Jaya

Merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual ditandai dengan transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani diri sendiri dengan mengambil kebutuhan yang diperlukan dari rak-rak yang sebelumnya sudah ditata. Informasi mengenai harga barang sudah dicantumkan pada label atau tabel yang ada di rak-rak tempat barang tersebut diletakkan dan merupakan harga pasti tanpa perlu aktivitas tawar menawar lagi.

- **Pasar Tradisional**

Ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya aktivitas transaksi jual beli secara langsung. Penetapan harga barang juga biasanya dilakukan dengan sistem tawar menawar antara pembeli dan penjual. Bangunannya berupa kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual ataupun pengelola pasar.

2.1.2.2 Pasar Ditinjau Dari Segi Fisik

- **Pasar Kongkret/ riil**

Pasar dimana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan nyata adanya. Ciri-cirinya: penjual dan pembeli bertemu secara langsung serta barang yang diperjualbelikan nyata ada, merupakan transaksi tunai, barang yang sudah dibeli dapat langsung dibawa.

- **Pasar Abstrak**

Pasar dimana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak nyata ada. Ciri-cirinya: penjual dan pembeli ada di tempat berbeda satu sama lain, transaksi mengandalkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan nyata tidak ketersediaannya.

2.1.2.3 Pasar Ditinjau Dari Segi Dagangannya

- **Pasar Umum**

Pasar umum adalah pasar dengan jenis barang dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis. Jenis dagangan pada pasar ini biasanya berupa kebutuhan sehari-hari.

- Pasar Khusus

Pasar khusus adalah pasar yang sebagian besar memperjualbelikan hanya satu jenis barang dagangan beserta kelengkapannya.

2.1.2.4 Pasar Menurut Luas Wilayah Kegiatannya

- Pasar Lokal

Jenis pasar yang wilayah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu saja, serta barang yang diperjualbelikan berupa barang kebutuhan sehari-hari dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

- Pasar Nasional

Jenis pasar yang wilayah pemasarannya berupa wilayah satu negara, serta barang yang diperjualbelikan berupa barang kebutuhan masyarakat dari negara tersebut.

- Pasar Regional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara.

- Pasar Internasional/ pasar dunia

Jenis pasar yang wilayah pemasarannya meliputi seluruh dunia, serta barang yang diperjualbelikan ialah barang kebutuhan bagi semua masyarakat dunia.

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Pengertian Pasar Tradisional

Pasar adalah salah satu aspek penting dalam melakukan kegiatan jual beli, karena pasar merupakan wadah untuk menampung kegiatan tersebut. Pasar tradisional adalah awal mula bentuk dari pasar di Indonesia. Karena sistem yang digunakan masih manual dan tradisional dengan proses jual beli barang berlaku sistem tawar menawar dan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran maka dari itu dinamakan pasar tradisional. Pengelola pasar tradisional bukanlah pedagang

melainkan pemerintah kabupaten/kota.⁹

Pasar dan pasar tradisional menurut Dewi Azimah dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, yang berjudul: “Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011” menyatakan bahwa: ¹⁰

“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan pengklasifikasiannya, pasar dibagi menjadi dua yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern”.

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

2.2.2 Ciri-ciri Pasar Tradisional¹¹

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah adalah pemilik, pengelola dan yang membangun Pasar tradisional.
2. Menggunakan sistem tawar menawar dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli. Penerapan sistem seperti inilah yang dapat menjalin hubungan sosial antar pedagang dan pembeli menjadi lebih dekat.
3. Beragam tempat usaha serta menyatu dalam lokasi yang sama. Setiap penjual menjajakan barang dagangan yang berbeda-beda meskipun berada pada lokasi

⁹ Dewi Azimah, *Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Fisisip Undip, Semarang, 2013 Hal. 1

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*

yang sama. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, buah, bumbu, dan daging.

4. Sebagian besar barang yang ditawarkan ialah barang lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan beberapa dagangan diambil dari hasil bumi di daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.

2.2.3 Potensi Pasar Tradisional

Beberapa potensi pasar tradisional adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan pasar tradisional dalam menyerap komoditi lokal dari kawasan sekitarnya.
2. Berfungsi sebagai supplier untuk berbagai input pertanian, perumahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas.
3. Pasar tradisional memiliki segmentasi pasar tersendiri, yang membedakannya dari pasar modern.
4. Para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesempatan berusaha untuk kaum wanita, dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen.
5. Potensi pasar akan semakin penting karena market turn over yang cepat dengan sistem pembayaran tunai.

2.2.4 Klasifikasi Pasar Tradisional

2.2.4.1 Klasifikasi Pasar Menurut Peraturan Daerah¹²

1. Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. Pasar Umum :
 - Pasar kelas I

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. (2011). *Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.*

Bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang dibuat secara permanen dan bertingkat serta letaknya strategis.

- Pasar kelas II

Bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang dibuat secara permanen dalam bentuk kios, los, ataupun lapak dan letaknya strategis.

- Pasar kelas III

Bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang berada di pasar yang dibuat secara semi permanen dalam bentuk kios, los, ataupun lapak dan letaknya strategis.

b. Pasar Khusus :

- Pasar hasil pertanian
- Pasar hewan
- Pasar ikan
- Pasar hasil industri

2.2.5 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar¹³

2.2.5.1 Pembangunan Baru

Pembangunan baru adalah pembangunan pasar dalam 1 (satu) lantai utama, di lokasi yang baru di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurangan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau reguler antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau diistilahkan dengan embrio pasar.

Pembangunan baru dilakukan terhadap bagian utama pasar yang berupa los dan/atau kios, papan nama pasar, dan sarana utama lainnya yang berupa toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, ketersediaan air bersih, tempat parkir, serta apabila dimungkinkan dapat dilengkapi dengan sarana

¹³ Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2011). *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011*.

penunjang pasar seperti kantor pengelola, dan/atau sarana ibadah.

Pembangunan baru didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan perekonomian di suatu daerah tertentu serta penetapan lokasi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Telah ada embrio pasar (aktivitas jual beli)
- Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya
- Lahan merupakan milik/aset pemerintah daerah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa
- Ketersediaan pasokan listrik yang memadai serta sarana jalan dan sarana transportasi yang mudah dilalui
- Lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat

2.2.5.2 Perluasan Pasar

Perluasan pasar adalah pembangunan sarana utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai utama, dengan memperluas lokasi pasar sebagai akibat dari aktivitas perdagangan dalam pasar yang meningkat. Hal ini dilakukan agar mampu menampung lebih banyak pedagang. Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Bagian utama bangunan pasar berupa los dan/atau kios tidak dapat menampung para pedagang yang ada
- Lahan merupakan milik/aset pemerintah daerah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa
- Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut
- Memberikan prioritas kepada pedagang lama/eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang pada bagian los dan/atau kios yang telah dibangun sebagai dampak dari perluasan pasar

2.2.5.3 Renovasi Bangunan Utama

Renovasi pasar adalah pembangunan pasar dengan melakukan perbaikan terhadap bangunan utama pasar seperti los dan/atau kios tanpa merubah lokasi tempat kedudukan pasar (pasar berada pada lokasi lama) dan tidak adanya perluasan lokasi maupun kapasitas daya tampung pasar.

Renovasi pasar dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

:

- Bangunan pasar tersebut sudah tidak layak lagi dalam menunjang aktivitas perdagangan, dan apabila alokasi anggaran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 masih memungkinkan dapat dilakukan renovasi terhadap sarana prasarana lain yang tidak berfungsi secara optimal seperti toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, pos ukur ulang
- Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut
- Memberikan prioritas kepada pedagang lama/ eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang

Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi pasar ini adalah pembangunan baru. Dikarenakan kondisi pasar saat ini adalah pasar sementara sebab pasar yang lama mengalami kebakaran pada bangunan utama serta tidak mampu menampung para pedagang yang semakin bertambah hingga memasuki kawasan permukiman penduduk yang memaksa banyak pedagang menjajakan dagangannya dipinggir jalan yang berdampak menjadi macet dan tidak kondusif serta tidak tersedianya tempat parkir yang merupakan salah satu sarana yang penting bagi pasar tradisional. Lahan yang akan digunakan untuk perluasan adalah tanah milik warga yang rencananya memang akan dibeli pemerintah untuk dapat dikembangkan. Pedagang lama akan diprioritaskan untuk menempati bangunan yang telah dibangun sebagai dampak pembangunan pasar baru.

2.2.6 Komponen Pasar Tradisional¹⁴

2.2.6.1 Pelaku Kegiatan

a. Pedagang

Pedagang pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan dengan cara menjual atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai wadah kegiatannya.

No	Kriteria	Jenis Pedagang
1	Menurut jumlah pelaku	Pedagang individu
		Pedagang gabungan
2	Menurut jenis kegiatan	Pedagang formal
		Pedagang informal
3	Menurut modal	Pedagang modal kecil
		Pedagang modal sedang
		Pedagang modal cukup
		Pedagang modal besar
4	Menurut status	Pedagang tetap
		Pedagang temporer
5	Menurut tempat asal	Pedagang desa
		Pedagang kota
6	Menurut cara penyaluran	Pedagang eceran
		Pedagang grosir
		Pedagang pengumpul

¹⁴ Ananta Heri P, d. (2011). *Menahan serbuan pasar modern strategi perlindungan dan pengembangan pasar tradisional*. Yogyakarta : Ombudsman swasta DIY

7	Menurut jangkauan pelayanan	Pedagang regional
		Pedagang kota
		Pedagang wilayah
8	Menurut cara pelayanan	Pedagang langsung
		Pedagang tidak langsung
9	Menurut materi dagangan	Pedagang barang riil
		Pedagang barang jasa

Tabel 2. 1 Jenis Pedagang Pasar

Sumber : Devi, Ni Made Winda Roosdiana (2013). Pasar Umum Gubug di Kabupaten Grobogan dengan Pengolahan Tata Ruang Luar dan Tata Ruang Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Pembeli

Pembeli pasar adalah pihak yang datang ke pasar memiliki tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan sehari-harinya dengan pelayanan langsung untuk bisa mendapatkan harga lebih murah.

c. Penunjang

Penunjang pasar yaitu :

- Pemerintah sebagai pemberi izin berdirinya dan beroperasinya pasar
- Swasta pedagang penyewa tempat, pelaksana pembangunan pasar
- Pengelola melaksanakan pembangunan, pengelola pemasaran tempat, pengelola kebersihan, pengelola distribusi barang dan stabilitas harga
- Bank memperlancar kegiatan ekonomi

2.2.6.2 Obyek Kegiatan

Obyek dalam kegiatan perdagangan suatu hasil produksi yang memiliki

implikasi tuntutan akan transportasi, komunikasi, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan materi perdagangan dikelompokkan dalam tabel berikut :

No	Kriteria	Jenis Barang Komuditi
1	Jenis Komuditi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan pangan : hasil pertanian/perkebunan, peternakan, bumbu-bumbuan, bahan pangan mentah yang diproses/matang • Bahan sandang • Barang kelontong dan peralatan rumah tangga • Barang-barang standar • Barang-barang khusus atau mewah
2	Sifat Komuditi	<p>Tingkat kebauan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bau, sangat menusuk, misal : ikan • Tidak terlalu bau, mempunyai bau tapi tidak menusuk hidung, misal : sayur-sayuran • Tidak bau, misal : pakaian, mainan, alat-alat rumah tangga <p>Tingkat keawetan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awet, tidak akan membusuk, misal : pakaian • Tidak terlalu awet, mempunyai waktu keawetan tertentu, misal : sayuran, buah-buahan, makanan kemasan • Tidak awet, misal : ikan segar, daging

		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kekeringan : • Kering, misal : pakaian • Sedikit basah, misal : sayuran, buah, bunga • Basah, misal : ikan segar, daging
3	Tingkat Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Barang kebutuhan sehari-hari • Barang keperluan berkala • Barang kebutuhan khusus
4	Waktu Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Barang yang dapat digunakan lama • Barang yang dapat digunakan sebentar saja
5	Maksud Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Barang-barang industri • Barang-barang penunjang hasil produksi • Barang-barang konsumsi
6	Cara Pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Barang pecah belah • Barang bukan pecah belah
7	Cara Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian sederhana, misal : sayur, ikan, bumbu • Penyajian sedang, misal : beras, dan semua yang diproses • Penyajian baik, misal : alat-alat rumah tangga

Tabel 2. 2 Pengelompokan Objek Kegiatan Pasar Tradisional

Sumber : Devi, Ni Made Winda Roosdiana (2013). Pasar Umum Gubug di Kabupaten Grobogan dengan Pengolahan Tata Ruang Luar dan Tata Ruang Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2.2.7 Fasilitas Pasar Tradisional

2.2.7.1 Fasilitas Fisik

- Elemen utama

Salah satu elemen utama yang terdapat pada pasar yaitu ruang terbuka. Area ini biasanya digunakan sebagai tempat los-los pedagang non permanen atau area parkir liar yang mulai marak muncul pada saat ini. Elemen utama lainnya yaitu ruang tertutup. Ruang tertutup yang dimaksud adalah ruangan yang tertutup sepenuhnya oleh dinding atau penyekat ruangan lainnya. Contohnya seperti toko, kios, los, dasaran, kamar mandi, dan gudang.

- Elemen penunjang

Contoh elemen-elemen penunjang pada pasar tradisional yaitu area bongkar muat barang dagangan, dan pos penjaga.

- Elemen pendukung

Beberapa elemen pendukung yang ada di pasar adalah pusat pelayanan kesehatan, penitipan anak, pelayanan jasa, kantor pengelola pasar, koperasi pasar, tempat ibadah seperti mushola atau masjid.

- Pencapaian

- Jaringan angkutan manusia dan barang

- Jaringan utilitas

Jaringan utilitas yang dimaksud adalah saluran listrik, air bersih, hydrant, komunikasi, dan sampah. Selain itu terdapat saluran-saluran air kotor dan limbah yang memenuhi kebutuhan pasar.

- Area parkir

- Fasilitas sosial

Fasilitas sosial seringkali terlupakan pada pasar tradisional saat ini. Salah satu contoh sederhana fasilitas sosial yang dapat diaplikasikan pada pasar tradisional yaitu teras yang dapat digunakan sebagai interaksi sosial. Selain itu, pemberian vegetasi yang dapat dijadikan tempat berteduh dan menjalin interaksi

sosial.

2.2.7.2 Fasilitas Non-Fisik

Selain fasilitas fisik pada pasar tradisional, ada pula fasilitas non-fisik yang terdapat pada pasar tradisional seperti sistem pengelolaan pasar, pelayanan dan pengawasan kesehatan dan kelengkapan komoditi yang tersedia dalam pasar.

2.2.8 Persyaratan Pasar Tradisional

2.2.8.1 Persyaratan Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat¹⁵

a. Lokasi

- Lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat
- tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dsb.
- Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.
- Memiliki batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya.

b. Bangunan

1. Umum

Bangunan dan rancangan bangunan harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Penataan Ruang Dagang

- Pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti basah, kering, penjual unggas hidup, pemotongan unggas dll.
- Pembagian zoning yang diberi identitas
- Tempat penjual daging, karkas unggas, dan ikan ditempatkan di tempat khusus.
- Setiap los memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter.

¹⁵ Keputusan Menteri Kesehatan. (2008). Nomor 59 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat

- Jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar utama minimal 10 meter atau dibatasi dengan tembok pembatas minimal ketinggian 1,5 meter.
3. Ruang Kantor Pengelola
- Ventilasi pada ruang kantor minimal 20% dari luas lantai.
 - Tingkat pencahayaan pada ruangan minimal 100 lux.
 - Tersedianya ruangan untuk pengelola dengan tinggi langit-langit sesuai ketentuan berlaku.
 - Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir
 - Tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan
4. Tempat Penjual Bahan Pangan dan Makanan
- a. Tempat Penjual Bahan Pangan Basah
- Permukaan meja tempat jualan rata dengan kemiringan cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air serta memiliki lubang pembuangan air , adanya sekat pembatas pada setiap sisi dan mudah dalam proses pembersihan, dengan tinggi dari lantai minimal 60 cm serta terbuat dari bahan material tahan terhadap karat bukan terbuat dari kayu.
 - Dalam penyajiannya, karkas daging haruslah digantung.
 - Alas pemotong bukan dari bahan kayu, tidak ada kandungan bahan beracun, kedap terhadap air, serta mudah dalam pembersihannya.
 - Tersedianya tempat pencucian untuk bahan pangan dan peralatan.
 - Tersedianya tempat untuk cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
 - Saluran pembuangan limbah tertutup, dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melewati area penjualan.
 - Tersedianya tempat sampah jenis kering dan basah, kedap terhadap air, tertutup dan mudah untuk diangkat.

b. Tempat Penjual Bahan Pangan Kering

- Tersedianya meja untuk berjualan dengan permukaan rata dan mudah dalam proses pembersihannya, tinggi dari lantai minimal 60 cm.
- Meja untuk berjualan bukan dari bahan kayu dan terbuat dari bahan tahan terhadap karat.
- Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
- Tersedia tempat untuk cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
- Tempat berjualan bebas dari faktor penular penyakit dan tempat perindukannya seperti kecoa, lalat, nyamuk, dan tikus.

c. Tempat Penjual Makanan Jadi/Siap Saji

- Tempat untuk menyajikan makanan harus tertutup dengan permukaan rata dan mudah dibersihkan dengan tinggi minimal dari lantai ialah 60 cm dan terbuat dari bahan tahan terhadap karat dan bukan bahan dari kayu.
- Tersedia tempat untuk cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
- Tersedia tempat untuk mencuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, bukan terbuat dari bahan mudah berkarat, dan mudah untuk dibersihkan.
- Saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup dengan kemiringan yang cukup.
- Tersedia tempat sampah jenis kering dan basah, kedap terhadap air, tertutup dan mudah untuk diangkat.
- Tempat penjualan bebas faktor penular penyakit dan tempat perindukannya seperti kecoa, lalat, nyamuk, dan tikus.

5. Area Parkir

- Terdapat pemisah atau sekat yang jelas sebagai pembatas bagi wilayah pasar.
- Terdapat parkir terpisah berdasarkan alat angkutnya seperti mobil, truk, motor.
- Tersedia parkir khusus untuk pengangkut hewan hidup dan hewan mati.

- Tersedia bongkar muat khusus terpisah dari tempat parkir dan pengunjung.
- Tidak terdapat genangan air.
- Adanya tempat sampah terpisah untuk sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup, minimal pada setiap radius 10 meter.
- Terdapat tanda masuk dan keluar kendaraan secara jelas.
- Terdapat tanaman untuk penghijauan.
- Terdapat resapan air pada pelataran parkir.

6. Konstruksi

a. Atap

- Atap kuat, tidak mudah bocor, dan tidak menjadi tempat bagi berkembangnya binatang penular penyakit.
- Kemiringan atap diterapkan sedemikian rupa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya genangan air pada atap serta langit-langit.
- Ketinggian atap harus sesuai ketentuan berlaku.
- Adanya penangkal petir pada setiap ketinggian atap yang melebihi 10 meter.

b. Dinding

- Permukaan dinding diharuskan bersih, tidak lembab serta menggunakan warna-warna terang.
- Permukaan dinding harus terbuat dari bahan kedap air dan kuat terlebih pada permukaan yang selalu terkena percikan air.
- Pertemuan lantai dan dinding serta pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung (conus).

c. Lantai

- Lantai terbuat dari bahan kedap terhadap air, permukaannya rata, tidak licin, tidak mudah retak, dan mudah untuk dibersihkan.
- Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran

pembuangan air.

d. Tangga

- Tinggi lebar dan kemiringan anak tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ada pegangan tangan di kanan dan kiri tangga.
- Terbuat dari bahan kuat dan tidak licin.
- Memiliki pencahayaan minimal 100 lux.

e. Ventilasi

Ventilasi minimal harus memenuhi syarat 20% dari luas lantai dan saling berhadapan (cross ventilation).

f. Pencahayaan

Pencahayaan cukup terang minimal 100 lux dan barang dagangan dapat dilihat dengan jelas.

g. Pintu

Khusus pintu los penjual daging, ikan dan bahan makanan berbau tajam menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri atau tirai plastik.

c. Sanitasi

1. Air Bersih

- Tersedia air bersih dengan jumlah minimal 40 liter setiap harinya secara berkesinambungan.
- Tersedianya tandon air bersih serta dilengkapi dengan kran air yang tidak bocor.
- Jarak minimal antara sumber air bersih dan pembuangan limbah yaitu 10 meter.

2. Kamar Mandi dan Toilet

- Tersedianya kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan yang terpisah serta dilengkapi dengan simbol penjelas dengan proporsi sebagai berikut:

No	Jumlah Pedagang	Jumlah Kamar Mandi
1	25	1
2	26 s.d 50	2
3	51 s.d 100	3

Tabel 2. 3 Ketentuan Jumlah Kamar Mandi Pasar Tradisional

Sumber : Devi, Ni Made Winda Roosdiana (2013). *Pasar Umum Gubug di Kabupaten Grobogan dengan Pengolahan Tata Ruang Luar dan Tata Ruang Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- Tersedia tempat untuk cuci tangan dengan jumlah yang cukup dan dilengkapi dengan sabun serta air mengalir.
 - Air limbah dibuang ke septick tank, riol atau lubang peresapandengan jarak 10 meter dari sumber air bersih agar tidak mencemari tanah.
 - Luas ventilasi minimal 20% dari luas lantai dengan pencahayaan 100 lux.
- d. Pengelolaan Sampah
- Setiap kios/ lorong/ los mamilki tempat sampah jenis basah dan kering.
 - Lokasi TPS tidak berada pada jalur utama pasar dan minimal berjarak 10 meter dari pasar.
- e. Drainase
- Selokan/drainase tertutup dengan kisi terbuat dari bahan logam sehingga dapat mudah dibersihkan.
 - Limbah cair disalurkan terlebih dahulu ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari setiap kios dan tidak langsung dibuang ke saluran pembuangan umum.
 - Kemiringan saluran drainase sesuai dengan ketentuan berlaku.

- Tidak ada Los atau kios yang didirikan diatas saluran drainase.

f. Keamanan

1. Pemadam Kebakaran

- Tersedianya pemadam kebakaran yang cukup dan berfungsi.
- Adanya hydran air dengan jumlah yang cukup menurut ketentuan berlaku.

2. Pos Keamanan

- Adanya pos keamanan dilengkapi dengan personil serta peralatannya.

g. Fasilitas Lain

1. Tempat Ibadah

- Tersedianya tempat ibadah dan tempat wudhu dengan lokasi mudah dijangkau serta adanya sarana air bersih.
- Ventilasi serta pencahayaan sesuai persyaratan.

2. Tempat Penjualan Unggas Hidup

- Memiliki tempat khusus terpisah dari pasar utama.
- adanya akses masuk dan keluar untuk kendaraan pengangkut unggas.
- Tersedianya fasilitas pemotongan unggas umum sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian.
- Tersedia tempat untuk cuci tangan.
- Tersedia saluran untuk pembuangan limbah.
- Tersedia penampungan sampah yang terpisah dari sampah pasar.

2.2.8.2 Persyaratan Berdasarkan Petunjuk Teknis Sarana Perdagangan¹⁶

a. Kebutuhan Ruang Pasar

¹⁶ Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2011). *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011*

1. Kios/ Los Pasar

- Letak kios tidak menghalangi arah angin.
- Kios yang berfungsi sebagai pembatas jalan umum dan area pasar dibuat menjadi dua muka.
- Letak kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain dibuat satu muka.

2. Papan Nama Pasar

- Papan nama pasar dengan mencantumkan logo kementerian perdagangan, nama pasar, dan logo pemda setempat.
- Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk :
 - Papan nama/plank
 - Prasasti
 - Gapura
- Lay out papan nama pasar :
 - Ukuran disesuaikan dengan bangunan fisik pasar.
 - Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar.
 - Logo Pemerintah Daerah (Pemda) ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar.
 - Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar.

3. Fasilitas Penunjang Pasar

- Kantor pengelola
 - Lokasi mudah untuk dicapai oleh pedagang dan pengunjung serta mudah untuk mengawasi aktivitas pasar.
 - Dilengkapi dengan papan penanda.
- Toilet

- Lokasi toilet jauh dari sumber air bersih.
- Lokasi mudah dijangkau dan dilengkapi dengan papan penanda.
- Jumlah toilet menyesuaikan luas pasar.
- Toilet laki-laki dan perempuan terpisah.
- Area parkir
 - Letak area parkir sedapat mungkin berdekatan dengan akses masuk.
 - Letak area parkir sedapat mungkin berada di sekeliling pasar.
 - Apabila memungkinkan, disediakan area parkir khusus untuk para pedagang.
- Mushola
 - Peletakan bangunan mushola usahakan berada disudut agar bebas dari keramaian.
 - Daya tampung minimal ialah 10 orang.
- Pos keamanan
 - Ditempatkan pada pintu masuk dan keluar pasar.
- Tempat penampungan sampah sementara
 - TPS jauh dari aktivitas pasar.
 - Jika memungkinkan, memiliki volume tampung untuk seluruh sampah pasar per hari.
- Tempat sampah
 - Diletakkan pada beberapa titik di sepanjang koridor antar los/ kios, dengan jarak dan ukuran sesuai dengan kebutuhan.

b. Penataan Terkait Sirkulasi Pedagang

- Pengelompokan pedagang menurut jenis atau sifatnya.
- Los/ kios yang menghadap keluar sebaiknya diperuntukan untuk los/ kios non sembako (misalnya, tekstil dan alat-alat kebutuhan rumah tangga), sedangkan

kios yang menghadap ke dalam untuk sembako kering dan warung.

- Los yang berada di tengah-tengah antara toko dan kios diperuntukkan komoditas sayur mayur, daging, ayam karkas, ikan basah serta sembako olahan lainnya.
- Komoditi basah seperti ayam karkas, ikan basah dan daging diletakkan terpisah dari los komoditi lainnya serta harus dilengkapi dengan fasilitas air bersih, sanitasi dan septic tank yang sesuai.

c. Penataan Terkait Sirkulasi Sampah

- Penyediaan tempat sampah pada beberapa titik lokasi di sepanjang koridor.
- Penyediaan tempat untuk penampungan sampah sementara pada setiap zonasi kios.
- Penyediaan tempat untuk penampungan akhir sampah untuk nantinya akan diangkut ke TPA.

d. Penataan Terkait Sirkulasi Udara

- Posisi kios dan los tidak menghalangi arah mata angin.
- Jika memungkinkan, plafon dapat dibuat cukup tinggi sehingga sirkulasi udara jadi lebih lancar.

e. Penataan Terkait Aspek Pencahayaan

- Pencahayaan menyesuaikan arah matahari terbit serta terbenam.
- Diusahakan seminimal mungkin dalam penggunaan energi untuk pencahayaan.
- Sebaiknya lantai koridor mendapatkan pencahayaan sinar matahari.

f. Bangunan Fisik Pasar

- Desain mempertimbangkan ciri khas daerah setempat namun tetap sederhana dan efisien.
- Harus mempertimbangkan material yang tahan bencana kebakaran dengan perawatan mudah.
- sebaiknya menggunakan besi galvanis karena bersifat anti karat pada struktur

rangka.

- Sebaiknya menggunakan material aluminium yang tahan lama dan ringan pada atap los dan/atau kios.
- Persyaratan atap bangunan :
 - Atap berbahan material yang tembus cahaya.
 - Desain atap diusahakan menyesuaikan karakter daerah tersebut.

2.2.8.3 Persyaratan Pasar Rakyat¹⁷

a. Klasifikasi Pasar

1. Tipe I

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang.

2. Tipe II

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 – 750 orang.

3. Tipe III

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 – 500 orang.

4. Tipe IV

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang.

b. Persyaratan Umum

1. Lokasi pasar

Lokasi pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Setiap lokasi pasar harus mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah.
- Lokasi pasar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat.
- Untuk pembangunan pasar di lokasi yang baru, terdapat persyaratan lokasi yang harus dipenuhi yaitu :
 - Akses menuju pasar disukung dengan transportasi umum sehingga mudah

¹⁷ Standar Nasional Indonesia 8152:2015. (2015). *Pasar Rakyat*

dan menjamin kelancaran bagi kegiatan distribusi dan bongkar muat.

- Terletak pada daerah aman dari bencana banjir dan tanah longsor.
- Jauh dari fasilitas yang dapat berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau tempat pembuangan sampah/ limbah kimia dengan minimal jarak 10 meter.

2. Kebersihan dan kesehatan

Kebersihan dan kesehatan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Fasilitas pasar harus bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti : kecoa, lalat, nyamuk, dan tikus.
- Fasilitas dan peralatan ruang dagang harus memenuhi ketentuan kesehatan antara lain :
 - Tempat penjualan makanan siap saji harus tertutup dalam penyajiannya.
 - Adanya tempat untuk penyimpanan bahan pangan basah dengan suhu rendah (4 – 10) °C, khusus untuk ruang dagang jenis bahan pangan basah.
 - Karkas daging diharuskan tergantung pada penyajiannya.
 - Tidak adanya kandungan bahan bersifat racun pada alas pemotong (talenan), kedap terhadap air, dan mudah untuk dibersihkan, dibedakan untuk bahan mentah serta matang.
 - Pembedaan penggunaan pisau untuk memotong bahan mentah dan matang serta tidak mudah berkarat.
 - Tersedia tempat pencucian bahan pangan dan peralatan.
 - Tersedia tempat untuk cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir, khususnya di tempat penjualan jenis bahan pangan basah.
 - Adanya ruang disinfektan.

3. Keamanan dan kenyamanan

- Penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa.
- Bahan bangunan hendaknya berupa bahan yang memudahkan perawatan.

c. Penerapan Persyaratan Pada Klasifikasi Pasar

1. Berdasarkan Tipe

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
1.	Jumlah pedagang terdaftar	> 750 orang	501 – 750 orang	250 - 500 orang	< 250 orang

Tabel 2. 4 Persyaratan pasar rakyat berdasarkan tipe

Sumber : SNI Pasar Rakyat, 2015

2. Persyaratan Teknis

2.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ²	Minimal 2 m ²	Minimal 2 m ²	Minimal 1 m ²
3.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos
4.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup
5.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar
6.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus	Tersedia khusus	ada	ada
7.	Akses untuk masuk dan keluar kendaraan	Terpisah	Terpisah	ada	ada
8.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,8 m	Minimal 1,8 m	Minimal 1,5 m	Minimal 1,2 m
9.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	ada

Tabel 2. 5 Persyaratan Teknis Pasar Rakyat

Sumber : SNI Pasar Rakyat, 2015

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
10.	Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 3 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi
11.	Jumlah toilet pada satu lokasi	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita
12.	Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah / lemari pendingin	ada	ada	-	-
13.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 3 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi
14.	Ruang Menyusui	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	ada	ada
15.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi	-
16.	Ruang perbantuan	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	Minimal 1 ruang	ada
17.	Ruang bersama	ada	ada	ada	-
18.	Pos kesehatan	ada	ada	ada	ada
19.	Pos keamanan	ada	ada	ada	ada
20.	Area merokok	ada	ada	ada	ada
21.	Ruang disinfektan	ada	ada	ada	-
22.	Area penghijauan	ada	ada	ada	ada
23.	Tinggi anak tangga (untuk pasar dengan 2 lantai)	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm
24.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm
25.	Akses untuk kursi roda	ada	ada	-	-
26.	Jalur evakuasi	ada	ada	ada	ada

Tabel 2. 6 Lanjutan

Sumber : SNI Pasar Rakyat, 2015

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
27.	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	ada	ada
28.	Hidran air	ada	ada	–	–
29.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
30.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
31.	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none"> • setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran • setiap fasilitas pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran • setiap fasilitas pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran • setiap fasilitas pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran • setiap fasilitas pasar
32.	Alat angkut sampah	ada	ada	ada	ada
33.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	ada	ada	ada
34.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	ada	ada	ada
35.	Sarana telekomunikasi	ada	ada	ada	ada

Tabel 2. 7 Lanjutan

Sumber : SNI Pasar Rakyat, 2015

3. Persyaratan Pengelolaan

36.	Informasi identitas pedagang	ada	ada	ada	ada
37.	Informasi kisaran harga	ada	ada	ada	ada
38.	Informasi zonasi pasar	ada	ada	ada	ada
39.	Prosedur Kerja /SOP	ada	ada	ada	ada

Tabel 2. 8 Persyaratan Pengelolaan Pasar Rakyat

Sumber : SNI Pasar Rakyat, 2015

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
40.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan, • Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan, • Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bidang Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas • Bidang Ketertiban dan Keamanan; • Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bidang Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas • Bidang Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan, dan Kebersihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas • Bidang Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan, dan Kebersihan.
41.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang
42.	Pelaksanaan sidang tera' tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun
43.	Program pengembangan dan aktivasi pasar	ada	ada	ada	ada
44.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	ada	ada	ada

Tabel 2. 9 Lanjutan

Sumber : SNI Pasar Rakyat, 2015

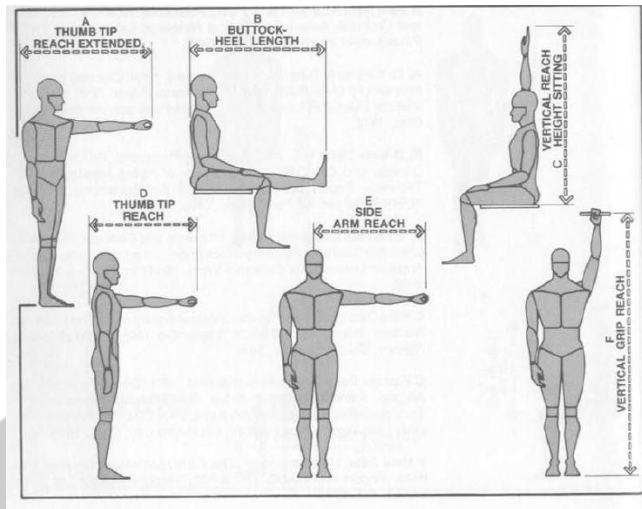
2.2.9 Standar Sarana Prasarana Pasar Tradisional

Berisi standar perabotan dan dimensi manusia yang menunjang keberadaan pasar tradisional sebagai ruang publik.

Adult Male and Female Functional Body Dimensions in Inches and Centimeters by Age, Sex, and Selected Percentiles													
		A		B		C		D		E		F	
		in	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	cm
95	MEN	38.3	97.3	46.1	117.1	51.6	131.1	35.0	88.9	39.0	96.4	88.5	224.8
	WOMEN	36.3	92.2	49.0	124.5	49.1	124.7	31.7	80.5	38.0	96.5	84.0	213.4
5	MEN	32.4	82.3	39.4	100.1	59.0	149.9	29.7	75.4	29.0	73.7	76.8	195.1
	WOMEN	29.9	75.9	34.0	86.4	55.2	140.2	26.6	67.6	27.0	68.6	72.9	185.2

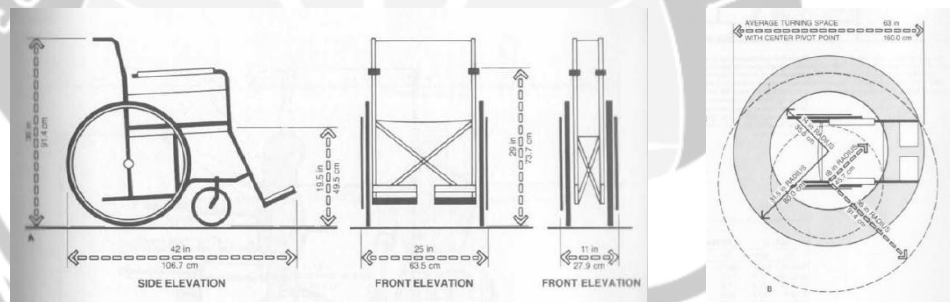
Gambar 2. 1 Standar Tubuh Fungsional

Sumber : Panero, 2003



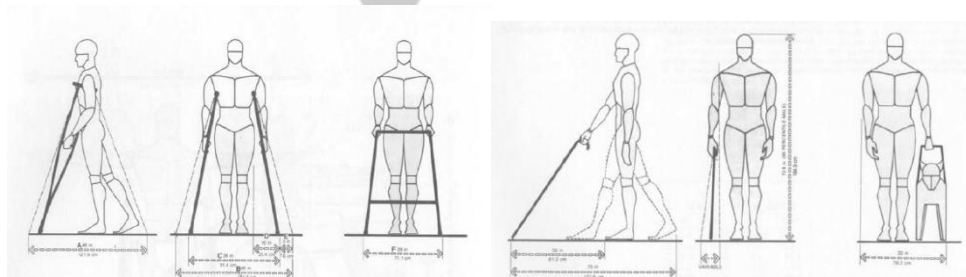
Gambar 2. 2 Standar Dimensi Tubuh Fungsional

Sumber : Panero, 2003



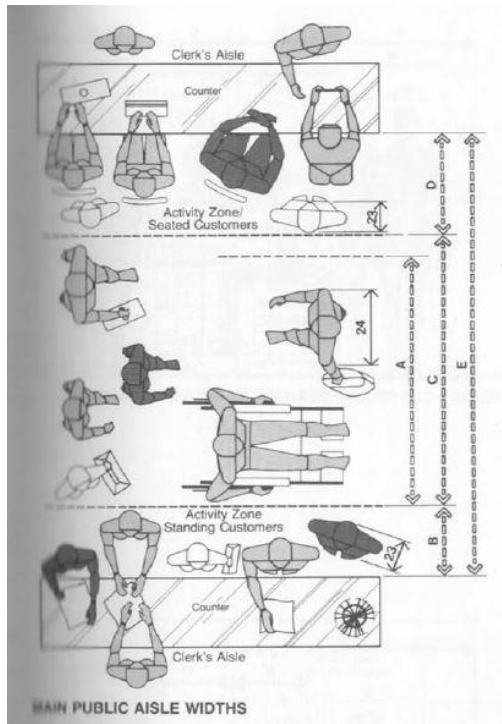
Gambar 2. 3 Standar Ruang Untuk Pengguna Kursi Roda

Sumber : Panero, 2003



Gambar 2. 4 Standar Ruang Untuk Pengguna Alalt Bantu Jalan

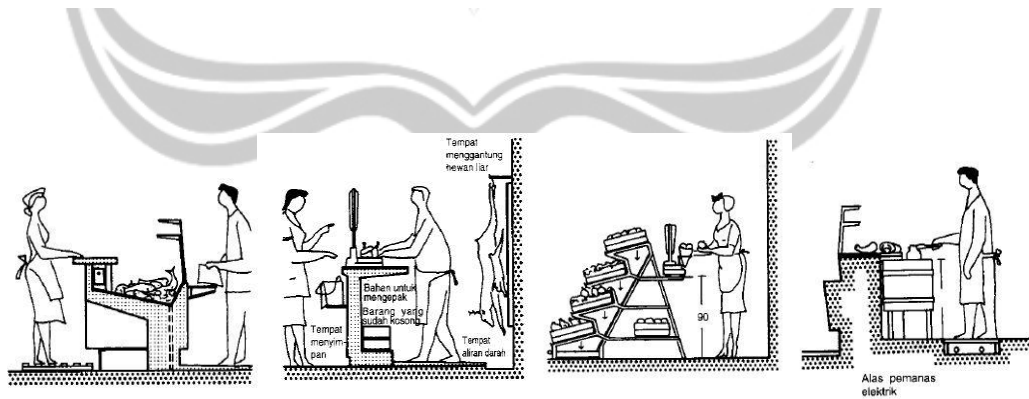
Sumber : Panero, 2003



	in	cm
A	66 min.	167.6 min.
B	18	45.7
C	72	182.9
D	26-30	66.0-76.2
E	116-120	294.6-304.8
F	30-36	76.2-91.4
G	18-36	45.7-91.4
H	18 min.	45.7 min.
I	51 min.	129.5 min.
J	66-90	167.6-228.6

Gambar 2. 5 Standar Sirkulasi

Sumber : Panero, 2003



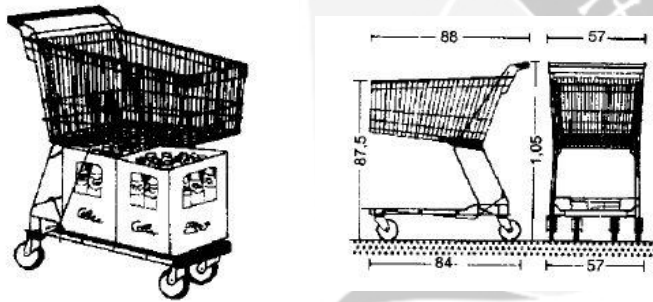
Gambar 2. 6 Standar Perabot Pada Display Kios

Sumber : Neufert, 2002



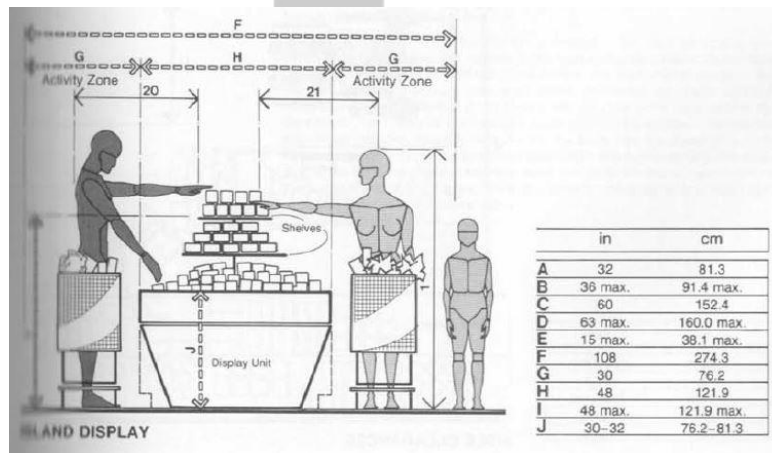
Gambar 2. 7 Standar Perabot Pada Display Kios

Sumber : Neufert, 2002



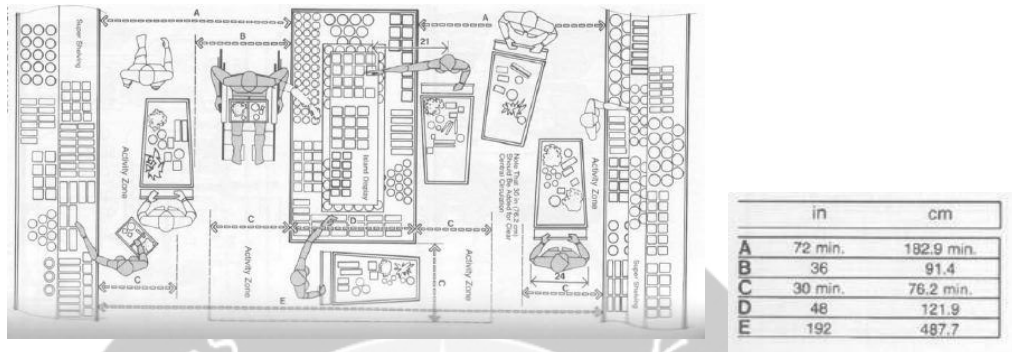
Gambar 2. 8 Standar Trolley

Sumber : Neufert, 2002



Gambar 2. 9 Standar Perabot Pada Display Los

Sumber : Panero, 2003



Gambar 2. 10 Standar Sirkulasi Pada Display Los

Sumber : Panero, 2003



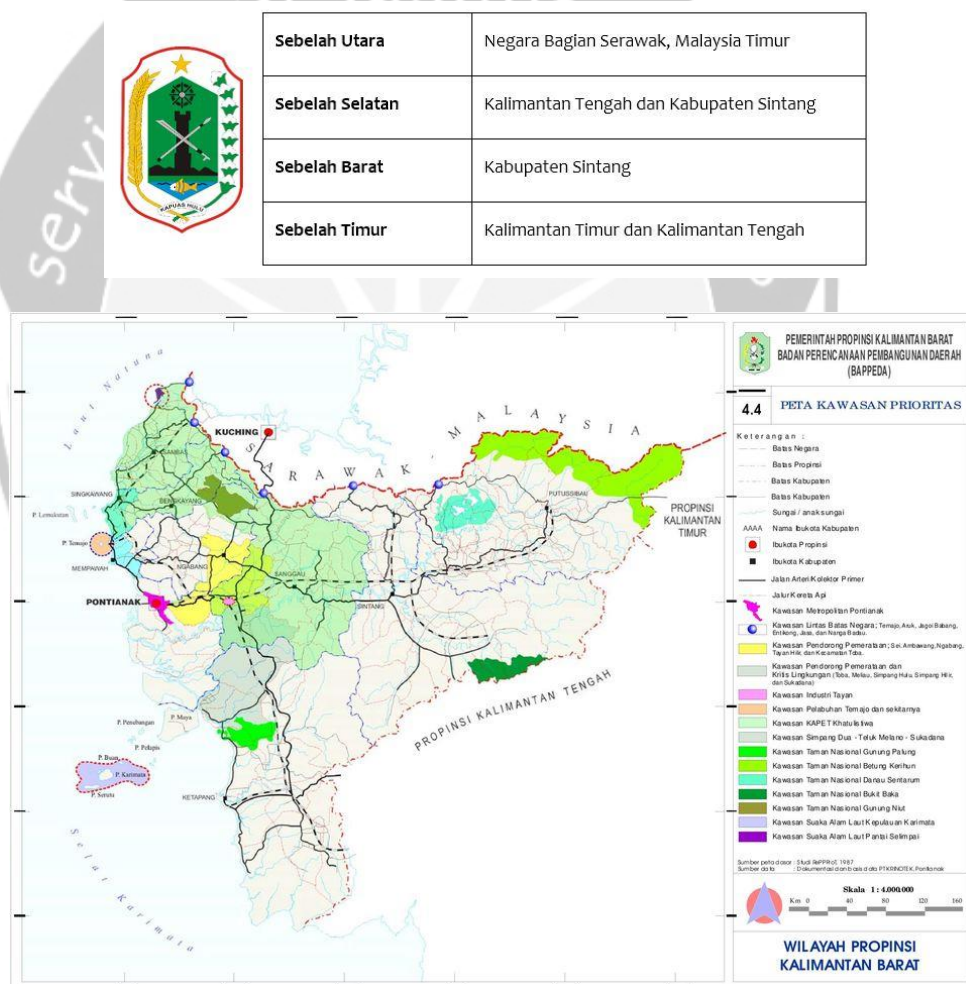
BAB III

TINJAUAN WILAYAH DAN KAWASAN

3.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

3.1.1 Kondisi Admisnistratif¹⁸

Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomis terletak di antara garis-garis 0,5° lintang utara 1,4° lintang selatan dan antara 111,40° bujur barat sampai 114,10° bujur timur dengan ibukota Putussibau. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat pada tabel berikut.



Gambar 3. 1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Sumber : BAPPEDA, Kalimantan Barat

¹⁸ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan, Data Base Pertanian, 2017.

Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Kapuas Hulu ialah adalah 29.842 Km² yang merupakan 20,33% dari wilayah Kalimantan Barat (146.807 Km²). Dari 23 Kecamatan, Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan dan Embaloh Hulu merupakan 3 Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas masing-masing 5.352.30 Km², 5.204.80 Km² dan 3.457.60 Km² atau setara dengan 17,94%, 17,94% dan 11,59% dari luas Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Kecamatan Puring Kencana merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil, dimana luas wilayah Kecamatan Puring Kencana yakni 258,66 Km² atau kurang dari 1% luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Secara administratif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011, Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi 23 Kecamatan, 282 Desa/Kelurahan dan 703 Dusun.

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS	
			Km ²	(%)
1	Putussibau Utara	Putussibau	5.204,80	17,44
2	Putussibau Selatan	Kedamin	5.352,30	17,94
3	Bika	Bika	395,16	1,32
4	Kalis	Nanga Kalis	1.857,84	6,23
5	Mentebah	Mentebah	781,26	2,62
6	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung	824,00	2,76
7	Pengkadan	Menendang	531,20	1,78
8	Hulu Gurung	Tepuai	432,90	1,45
9	Seberuang	Sejiram	573,80	1,92
10	Semitau	Semitau	562,70	1,89
11	Suhaid	Nanga Suhaid	465,91	1,56
12	Selimbau	Selimbau	1.153,88	3,87
13	Jongkong	Jongkong	422,50	1,42
14	Bunut Hilir	Nanga Bunut	844,10	2,89
15	Bunut Hulu	Nanga Suruk	1.118,15	3,75
16	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	786,30	2,63
17	Embaloh Hulu	Banua Martinus	3.457,60	11,59
18	Batang Lupar	Lanjak	1.332,90	4,47
19	Badau	Badau	700,00	2,35
20	Empanang	Nanga Kantuk	547,14	1,83
21	Puring Kencana	Sungai Antu	258,66	0,87
22	Silat Hilir	Nanga Silat	1.177,10	3,94
23	Silat Hulu	Nanga Dangkan	1.061,80	3,56
TOTAL			29.842,00	100,00

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dirinci per Kecamatan

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

3.1.2 Kondisi Geografis¹⁹

3.1.2.1 Letak Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu, secara astronomis berada pada 0,5 Lintang Utara sampai 1,4 Lintang Selatan dan 111,40 sampai 114,10 Bujur Timur dengan ibukota Putussibau. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Melawi, sementara sebelah Timur Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak kurang lebih 240 Km dan melebar dari Utara ke Selatan dengan jarak kurang lebih 126,70 Km. kabupaten Kapuas Hulu terletak di ujung paling Timur Provinsi Kalimantan Barat, dengan jarak kurang lebih 657 Km melalui jalan darat, dan 842 Km melalui Sungai Kapuas. Waktu tempuh ke Pontianak kurang lebih 45 menit penerbangan menggunakan Pesawat Udara jenis ATR 42 Seri 300/F27 atau kurang lebih 16 jam dengan kendaraan darat.

3.1.2.2 Topografi

Sebagian besar daerah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 250-500 mdpl. Sedangkan daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di pegunungan Kapuas Hulu disebelah Utara dan bagian paling timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah, daerah lembah dan lereng pegunungan Kapuas Hulu dan pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian di atas 100-500 mdpl. Sebagian kecil daerah perbukitan gugusan disebelah utara dan timur Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 mdpl.

3.1.3 Kondisi Klimatologis²⁰

Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di daerah equatorial menerima surplus panas sepanjang tahun karena dampak ekinok (kedudukan matahari tepat pada equator pada tanggal 21 maret dan 23 september). Energi panas ini dipakai untuk

¹⁹ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan, Data Base Pertanian, 2017.

²⁰ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan, Data Base Pertanian, 2017.

menggerakkan atmosfer melalui awan cumulus tinggi (cumulonimbus) yang mudah terbentuk di daerah ini.

Dengan demikian membuat jumlah curah hujan di daerah ini selalu tinggi sepanjang tahun, sehingga daerah Kapuas Hulu tipe iklimnya adalah campuran antara tipe equatorial dan tipe tropis.

Untuk mendukung pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan cuaca di daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- Jumlah curah hujan pada umumnya berkisar antara 3300-5000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 240-260 hari/tahun
- Suhu udara berkisar antara 21°C – 35°C
- Kelembaban udara berkisar antara 33 – 98 %
- Tekanan udara berkisar antara 1010 – 1016 Mb
- Angin bertiup dari arah barat – barat daya dengan kecepatan antara 1 – 2 knot

Fenomena cuaca lainnya berupa hujan deras tiba-tiba disertai angin kencang sesaat dapat terjadi di beberapa tempat yang sifatnya lokal (dalam daerah sempit dan waktu yang singkat 5–10 menit) pada sore dan malam hari, yang berasal dari awan cumulonimbus (awan kehitam-hitaman). Jumlah curah hujan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi dalam 1 tahun berkisar antara 4500 – 6000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240–360 hari pertahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar rata-rata antara 29–124 mm/hari, sedangkan intensitas hujan rata-rata 0,10 mm/menit. Dari data grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2010 (rata-rata 503,5 mm) diikuti pada tahun 2013 (rata-rata 381,23 mm). Sedangkan jumlah hari hujan bulanan dan curah hujan maksimum tahun 2016 dilihat pada tabel berikut :

	Bulan	Jumlah Curah Hujan / Total Rainfall (mm)	Jumlah Hari Hujan / Rainy Day
1	Januari	459,1	21
2	Februari	508,4	27
3	Maret	459,1	21
4	April	435,7	22
5	Mei	513,2	26
6	Juni	452,4	28
7	Juli	175	19
8	Agustus	189,2	16
9	September	457,4	21
10	Oktober	189,2	16
11	November	320,3	23
12	Desember	342,1	21
	Rata-rata	4502,1	261

Tabel 3. 2 Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan

Sumber : Stasiun Meteorologi Pangsuma, Kapuas Hulu

Daerah Kapuas Hulu mempunyai suhu rata-rata tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, karena matahari terus menerus di atas kawasan khatulistiwa sehingga kawasan tersebut banyak menerima cahaya, perubahan harian sangat kelihatan dan menjadi ciri khas kawasan ini, suhu udara mencapai maksimum sekitar atau beberapa waktu setelah matahari mencapai titik tertinggi (kulminasi) diantara pukul 12.00–15.00 waktu setempat yang dapat mencapai 34°C sampai dengan 35°C, sedangkan suhu terendah terjadi berkisar pada pagi hari antara 04.00–05.00 waktu setempat yang dapat mencapai 21°C–22°C. Kelembaban nisbi adalah nilai perbandingan antara tekanan uap air yang ada dicapai pada suhu dan tekanan udara pada saat itu. Banyaknya uap air di dalam udara tergantung kepada banyak faktor, antara lain ketersediaan air dan sumber uap, suhu, tekanan udara, angin. Udara yang suhunya tinggi mempunyai kemampuan menyimpan uap air lebih banyak dibandingkan udara yang suhunya lebih rendah, karena di dalam udara yang suhunya rendah uap air mudah mengembun kembali menjadi air. Karena perbedaan suhu dan tekanan antara suatu tempat dan pada tempat yang lain,

menimbulkan gerakan udara yang disebut angin. Angin dicirikan dengan arah datangnya dan kecepatannya. Arah angin dinyatakan dengan derajat ($^{\circ}$) azimuth angin dari utara arahnya dinyatakan 360° , dari timur 90° , dari selatan 180° , dari barat 270° . Arah 0° diindikasikan sebagai keadaan dimana tidak ada angin sama sekali. Kecepatan angin dinyatakan dalam Km/jam, M/detik, atau dalam knot (1 knot = 1 Mil/jam = 1,8 Km/jam).

3.1.4 Kondisi Sosial Budaya²¹

3.1.4.1 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 berjumlah 240.410 jiwa yang menyebar di 23 Kecamatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842 Km², Kapuas Hulu mempunyai kepadatan penduduk antara 7–8 jiwa/Km². Hal ini berarti masih banyak sekali lahan kosong yang belum berpenghuni yang bisa dimanfaatkan terutama untuk sektor pertanian. Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Putussibau Utara, Putussibau Selatan dan Silat Hilir yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk 26.283 jiwa, 20.726 jiwa, dan 18.808 jiwa. Walaupun ketiga Kecamatan tersebut mempunyai jumlah penduduk yang besar, namun Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Hulu Gurung yaitu 32 jiwa/Km² disusul oleh Kecamatan Jongkong 26 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Embaloh Hulu yaitu hanya 1 jiwa/Km². Struktur umur penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu masih berada pada struktur umur “muda”. Kelompok umur anak-anak (15 tahun ke bawah) dan kelompok umur muda (20 – 39 tahun) komposisinya terlihat relatif lebih besar dibanding kelompok lainnya. Komposisi umur penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Kelompok anak-anak (usia < 15 tahun) : 29,22 %
- Kelompok remaja (usia 15 – 19 tahun) : 8,16 %
- Kelompok muda (usia 20 – 39 tahun) : 34,53 %

²¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017*.

- Kelompok dewasa (usia 40 – 54 tahun) : 6,32 %
- Kelompok tua (usia 55 – 64 Tahun) : 3,72 %
- Kelompok lansia (usia > 65 Tahun) : 3,50 %

Perbandingan jumlah penduduk antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2015 adalah 103,63. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan, dimana perbandingannya adalah pada setiap 100 orang perempuan terdapat 103 – 104 laki-laki. Sedangkan jika dilihat angka rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk antara usia non produktif (usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun) terhadap usia produktif (15 – 64 tahun) adalah sebagai berikut :

- Rasio ketergantungan anak-anak : 43,58 %
- Rasio ketergantungan lansia : 5,55 %
- Total rasio ketergantungan : 49,13 %

Dengan demikian, pada tahun 2015 setiap 100 orang berusia produktif di Kapuas Hulu secara rata-rata terbebani oleh sekitar 49 – 50 orang berusia tidak produktif (terdiri atas 5–6 orang lansia dan 43–44 orang anak-anak).

3.1.4.2 Pendidikan²²

Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu tercatat sebanyak 50 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 425 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 115 sekolah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 37 sekolah.

Murid Taman Kanak-kanak yang terdaftar untuk tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 2.175, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 3,13 % dari tahun ajaran sebelumnya. Sekolah Dasar sebanyak 32.317 murid, turun 0,97 %. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 11.844 murid naik sebesar 12,95 % dari tahun ajaran sebelumnya. Sedangkan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pada tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 7.057 murid, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,82 % atau sebanyak 58 murid jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya.

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017*. Hal. 73

3.1.4.3 Kesehatan²³

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka kebijaksanaan pemerintah di bidang kesehatan adalah menyediakan berbagai sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 yaitu terdapat 2 RSUD, 23 puskesmas, 91 puskesmas pembantu, serta 220 polindes/poskesdes. Pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain diupayakan melalui gerakan Keluarga Berencana untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal. Keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain berkat peran serta masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah khususnya di bidang keluarga berencana. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana guna memberikan rangsangan pada PUS untuk ikut berpartisipasi ditunjukkan dengan munculnya akseptor baru.

3.1.4.4 Keagamaan²⁴

Dalam bidang keagamaan, penduduk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu menganut beberapa macam agama, sehingga beberapa tempat ibadah didirikan sebagai sarana beribadah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 2014 diketahui data jumlah rumah ibadah yang terdiri dari masjid sebanyak 238 buah, surau sebanyak 217 buah, gereja dan kapel khatolik sebanyak 268 buah, seta gereja kriter protestan sebanyak 4 buah.

3.1.4.5 Mata Pencarian

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017*. Hal. 75

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017*. Hal. 76

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian masih menjadi andalan rakyatnya sebagai mata pencaharian, begitu pula dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil survei ketenagakerjaan nasional (SAKERNAS) pada tahun 2015 persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang telah bekerja disektor pertanian mencapai 68,46 % kemudian disusul sektor manufaktur sebesar 10,99 %, serta sektor jasa yang persentasenya sebesar 20,55 %.

3.1.5 Fisik Prasarana Daerah²⁵

Aspek fisik prasarana daerah sebagai penopang kegiatan pembangunan daerah diantaranya meliputi deskripsi dan statistik prasarana dan sarana sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang meliputi tata ruang, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi dan lainnya termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah bidang prasarana dan sarana berikut kebijakan pengembangannya. Usaha pembangunan daerah Kapuas Hulu tidak dapat dilepaskan dari daya dukung dan potensi pengembangan dan sistem tata ruang wilayahnya. Sistem transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, sistem pelayanan air bersih serta sistem pelayanan energi listrik merupakan sistem prasarana wilayah sangat penting untuk menunjang usaha pengembangan wilayah Kapuas Hulu terutama dalam pengembangan sektor sosial ekonomi baik dalam sistem kehidupan sosial, produksi maupun perdagangan (lokal, antar pulau dan internasional).

3.1.5.1 Sistem Tata Ruang Wilayah

Kedudukan dan fungsi Kabupaten Kapuas Hulu dalam konteks struktur tata ruang Provinsi Kalimantan Barat dapat ditinjau dari 4 aspek utama yaitu :

1. Fungsi dan peranan Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang digariskan melalui sistem pembagian Wilayah Pembangunan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan dan Repelita Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
2. Struktur kawasan lindung dan budidaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

²⁵ RPJM kabupaten Kapuas Hulu. (2013). Tahun 2013 – 2018 *tentang gambaran Umum Kondisi Daerah*

3. Sistem kota-kota di Kalimantan Barat, baik kondisi eksisting maupun rencana pola pengembangan sistem kota-kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat.
4. Keterkaitan ruang antar wilayah di Kalimantan Barat terutama dikaitkan dengan sistem transportasi yang ada dan rencana pengembangan yang telah tertuang dalam RTRWP Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, maka Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan sebagai bagian Wilayah Pembangunan D bersama-sama dengan Kabupaten Sintang dengan Pusat Pengembangan di Kota Sintang. Kota Putussibau sebagai ibukota Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai salah satu subpusat pengembangan disamping Kota Semitau (Kabupaten Kapuas Hulu), Nanga Merakai dan Nanga Pinoh (Kabupaten Sintang). Ini berarti secara makro, Kabupaten Kapuas Hulu dinilai relatif erat kaitannya dengan Kabupaten Sintang yang secara fisik maupun ekonomis lebih berkembang. Dalam rencana pemantapan kawasan lindung yang tertuang dalam RTRWP Kalimantan Barat, telah ditetapkan bahwa + 44 % kawasan berfungsi lindung di Kalimantan Barat berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis kawasan yang dilindungi yang cukup luas adalah Taman Nasional Betung Kerihun, Hutan Lindung dan Daerah Resapan Air. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geomorfologis Kabupaten Kapuas Hulu dimana sebagian besar daerah dengan kemiringan diatas 40 % dan ketinggian di atas 500 m (kriteria utama penentuan kawasan hutan lindung), berada di Kabupaten ini. Dengan demikian, keselamatan dan kelestarian lingkungan Kalimantan Barat banyak tergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kata lain, dalam konteks provinsi, Kabupaten Kapuas Hulu berfungsi dan berperanan besar sebagai wilayah konservasi demi menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan baik Kabupaten Kapuas Hulu sendiri maupun wilayah lain terutama daerah sepanjang aliran Sungai Kapuas. Sementara itu, dibagian lain RTRWP Kalimantan Barat Tahun 2008 yaitu dalam arahan pengembangan kawasan budidaya, Kabupaten Kapuas Hulu umumnya diarahkan pada pengembangan pertanian pangan terutama palawija (kacang tanah, kacang hijau dan kedelai) dan perikanan air tawar. Pengembangan kegiatan budidaya tersebut dimaksudkan untuk menunjang

kegiatan industri pengolahan hasil pertanian di Kota Sintang (sebagai pusat WP D). Diharapkan pula Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pemasok bahan makanan terutama palawija dan ikan air tawar bagi seluruh wilayah Kalimantan Barat bahkan ditingkatkan agar komoditi tersebut dapat diekspor ke luar Kalimantan Barat. Berdasarkan kriteria penentuan pusat-pusat pertumbuhan yang berlaku bagi seluruh wilayah provinsi Kalimantan Barat, tercatat 38 pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Barat, 3 diantaranya terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Putussibau, Selimbau dan Semitau. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya hanya merupakan pusat pemerintahan dimana kantor camat berada dengan skala pelayanan maksimal wilayah kecamatannya masing-masing. Bila kita lihat sepintas letak geografis ketiga pusat tersebut, dapat dikatakan bahwa Putussibau merupakan pusat pertumbuhan wilayah timur kabupaten, Semitau sebagai pusat pertumbuhan wilayah barat kabupaten sedangkan Selimbau merupakan pusat pertumbuhan diantara kedua wilayah timur dan barat. Dalam skala provinsi, Kota Putussibau diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan orde ketiga, Semitau sebagai pusat pertumbuhan orde keempat sedangkan Selimbau diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan orde kelima. Ini berarti, dalam skala kabupaten, Putussibau dapat dianggap sebagai pusat pertumbuhan orde kesatu, Semitau kedua dan Selimbau ketiga. Kota Putussibau, seperti hasil indentifikasi skala provinsi, merupakan pusat orde pertama dalam skala Kabupaten Kapuas Hulu. Kota ini memiliki hampir semua fungsi yang telah ditelaah. Indeks Sentralitas kota tersebut sebesar 218,0; jauh diatas kota-kota lainnya. Kota ini memiliki fungsi sebagai:

- pusat permukiman,
- pusat pemasaran dan perdagangan,
- pusat perhubungan dan telekomunikasi,
- tempat kegiatan usaha jasa dan produksi, dan
- tempat pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.

Melihat fungsinya yang relatif kompleks, dapat dikatakan bahwa Kota Putussibau merupakan pusat pelayanan utama wilayah Kapuas Hulu sebagai Pusat Pelayanan Regional. Sementara, sebagai kota orde kedua adalah Semitau dengan indeks sentralitas sebesar 123,3. Di kota orde kedua ini semua jenis fasilitas yang ditelaah telah ada, sama dengan di Kota Putussibau, hanya fasilitas kesehatan yang

di Putussibau sudah pada tingkat Rumah Sakit, di Semitau hanya berupa Puskesmas. Dengan demikian dapat dikatakan, untuk kondisi saat ini kota Semitau lebih merupakan wakil Putussibau untuk melayani wilayah kabupaten bagian barat. Kota-kota orde ketiga memiliki indeks sentralitas di atas 90 yaitu Nanga Tepuai dan Kedamin. Bila dalam analisis skala provinsi, kota yang diidentifikasi sebagai kota orde ketiga skala Kabupaten Kapuas Hulu (orde kelima skala provinsi) adalah Kota Selimbau. Akan tetapi, dalam analisis skala kabupaten ternyata Kota Selimbau hanya menduduki hirarkhi keempat. Hal yang menarik disini adalah terjadinya pergeseran peranan Kota Nanga Tepuai yang menggantikan posisi Kota Selimbau dan Nanga Bunut yang pada tahun 1990 masih merupakan kota orde ketiga. Hal ini lebih disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan Kota Nanga Tepuai sebagai akibat besarnya peranan jalur lintas selatan yang melaluinya. Kota Kedamin teridentifikasi sebagai kota orde ketiga lebih disebabkan oleh kedekatannya dengan Kota Putussibau. Integrasi merupakan indikator tingkat kemampuan suatu wilayah dalam memiliki keuntungan internal yang dapat terus berlangsung di dalamnya dan kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam interaksi terhadap wilayah luar perekonomian regional dan nasional. Integrasi terutama ditentukan oleh jumlah interaksi yang timbul diantara pusat-pusat permukiman dalam suatu wilayah. Jumlah interaksi dalam suatu sistem spasial tergantung pada tingkat artikulasi dalam hirarkhi pusat-pusat permukiman, jarak antar pusat, akses yang efektif bagi penduduk untuk mencapai pusat lainnya serta keragaman jumlah fungsi-fungsi dalam pusat tadi. Berdasarkan jumlah interaksi yang ditimbulkan akibat keterkaitan antar pusat, Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi 2 sistem pusat yaitu :

□ **Sistem Pusat-Pusat Kapuas Hulu Timur**

Sistem pusat-pusat ini meliputi kota-kota Putussibau, Nanga Bunut, Nanga Embaloh, Bika, Kedamin, Kalis, Mentebah, Banua Martinus dan Nanga Suruk. Sistem pusat-pusat ini berorientasi ke Kota Putussibau. Kota ini disamping sebagai pusat pengembangan kabupaten juga berfungsi sebagai pusat pengembangan subregional Kabupaten Kapuas Hulu bagian timur, dan pusat pengembangan lokal dengan wilayah pengembangan Kecamatan Putussibau, Kedamin, Kalis, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Bunut Hulu, Mentebah dan Kecamatan Manday. Sedangkan Kota Nanga

Bunut menjadi pusat pengembangan lokal yang meliputi Kecamatan Bunut Hilir dan Embaloh Hilir.

□ **Sistem Pusat-Pusat Kapuas Hulu Barat**

Sistem pusat-pusat Kapuas Hulu bagian barat ini meliputi kota-kota Semitau, Suhaid, Selimbau, Batu Datu, Nanga Silat, Nanga Badau, Jongkong, Sejiram, Nanga Dangkan, Nanga Tepuai, Boyan Tanjung, Lanjak, Nanga Kantuk dan Puring Kencana. Orientasi utama sistem pusat ini adalah Kota Semitau yang berfungsi sebagai pusat pengembangan subregional Kapuas Hulu Barat dan sekaligus pusat pengembangan lokal yang meliputi Kecamatan Semitau, Selimbau, Silat Hilir, Suhaid, Silat Hulu, Seberuang, Empanang, Nanga Badau, Puring Kencana, dan Batang Lupar. Sedangkan kecamatan-kecamatan Embau, Hulu Gurung Batu Datu dan Boyan Tanjung berorientasi lokal ke Kota Nanga Tepuai. Struktur pusat-pusat pelayanan ini masih akan terus bergeser sejalan dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu terutama sebagai konsekuensi logis dari perkembangan peranan transportasi darat yang lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem transportasi tradisional pelayaran sungai.

3.1.5.2 Sistem Transportasi / Perangkutan Wilayah

Sistem perangkutan yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perpaduan antara subsistem perhubungan darat, perhubungan sungai dan perhubungan udara. Arah kebijakan umum pembangunan transportasi yang telah dilaksanakan selama ini pada intinya menitikberatkan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan perdagangan global, membuka akses dan layanan perhubungan masyarakat serta meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas, sehingga diharapkan mampu menciptakan kelancaran dalam pergerakan arus barang dan penumpang. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui program-program kerja, seperti rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; penataan terminal, dermaga dan bandara; pembangunan dan pemeliharaan halte; pengujian kendaraan bermotor; pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu di jalan, sungai dan danau; peningkatan jumlah jalan dan penggantian jembatan; peningkatan sarana

angkutan sungai, danau dan penyeberangan; serta pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan penerbangan. Perangkutan sungai merupakan salah satu sarana penghubung yang vital di kabupaten Kapuas Hulu yang umumnya digunakan sebagai sarana penghubung antar kecamatan ke desa atau kecamatan ke kabupaten menggunakan sungai Kapuas sebagai jalur utama perhubungan dan perekonomian. Namun kondisi terakhir mencatat adanya kecenderungan penurunan pemanfaatan angkutan sungai di beberapa kecamatan yang dilalui aliran sungai, hal ini disebabkan karena beberapa kecamatan lintas sungai kapuas saat ini sudah banyak dan dapat dijangkau melalui jalan darat, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jalan darat dengan biaya yang relatif lebih murah dan jarak tempuh yang pendek dibandingkan jalur air. Secara historis peranan pengangkutan sungai di Kabupaten Kapuas Hulu sangat penting dalam mendukung sistem pengangkutan barang dan penumpang lokal. Meskipun jaringan jalan raya sudah kian berkembang, peranan angkutan sungai masih tetap penting terutama pada daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau jaringan jalan raya. Bahkan pada daerah dimana jalan raya melintas secara paralel dengan jalur pelayaran sungai, pengangkutan barang melalui sungai masih banyak dilakukan. Seluruh kota yang berada pada jalur Sungai Kapuas, boleh dikatakan memiliki akses cukup baik ke Putussibau dan Sintang. Jalur pelayaran orde kedua terjadi pada kota pada jalur utama (Sungai Kapuas) dengan kota-kota di pedalaman. Dari Putussibau ke kota di jalur utama dapat ditempuh antara 1,5 sampai 32 jam dengan motor tambang berkapasitas di atas 10 ton. Sedangkan jalur pelayaran orde kedua dapat ditempuh antara 5 sampai 10 jam dengan menggunakan motor air berkapasitas di bawah 10 ton. Sepuluh ibukota kecamatan berada pada jalur utama yang dapat dilalui motor tambang berkapasitas di atas 10 ton, sedangkan 13 ibukota kecamatan lainnya hanya dapat dilayani oleh pelayaran motor air berkapasitas di bawah 10 ton, ibukota Kecamatan Badau hanya dapat dijangkau dengan longboat dengan kapasitas maksimal 2,5 ton.

Dengan demikian barang-barang dari Pontianak yang dibawa dengan motor tambang harus dipindahkan ke kapal motor air berukuran lebih kecil sebelum didistribusikan ke kota kecamatan di pedalaman. Hasil pertanian rakyat di pedalaman harus diangkut dengan motor air dan kemudian dipindahkan ke motor

tambang di kota-kota kecamatan yang dilalui motor tambang. Fenomena tersebut yang menyebabkan barang konsumsi dari luar Putussibau lebih mahal dan sebaliknya harga-harga produk pertanian dijual lebih murah. Beberapa sarana dan jumlah angkutan sungai yang tercatat pada tahun 2003 diantaranya adalah kapal sungai (297 unit), motor bandung (50 unit), motor tambang (18 unit) dan speed tambang sebanyak 68 unit. Sedangkan untuk tarif di beberapa jalur pengangkutan transportasi sungai ini diantaranya berkisar antara Rp 20.000,- hingga Rp 70.000,- dengan jarak tempuh 1,5-32 jam untuk trayek Putussibau-Sintang yang melayani jalur dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan, sedangkan untuk trayek Putussibau-Pontianak dengan jalur pelayanan yang sama, tarifnya berkisar Rp 15.000,- hingga Rp 60.000,- (jarak tempuh 1,5-28 jam). Sementara untuk besarnya tarif perjalanan angkutan sungai dari ibukota kecamatan pesisir sungai Kapuas ke ibukota kecamatan daerah pedalaman berkisar antara Rp 20.000,- hingga Rp 55.000,- dengan jarak tempuh 2-3,5 jam. Kelancaran sistem perangkutan sungai sangat tergantung pada iklim dan cuaca terutama siklus hidrologi wilayah Kapuas Hulu. Pada musim kemarau, umumnya debit dan tinggi permukaan air sungai menurun sehingga kapasitas sungai sebagai jalur angkutan menjadi menurun pula. Bahkan, bila kemarau berjalan cukup panjang maka debit air Sungai Kapuas-pun sampai pada titik dimana motor tambang tidak dapat melaluinya. Di beberapa pusat permukiman dimana jalan raya sebagai alternatif belum berfungsi dengan baik, maka pada saat-saat kemarau panjang harga bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari menjadi sangat mahal. Kenyataan ini menunjukkan bagaimana pelayaran sungai di Kapuas Hulu merupakan sistem transportasi yang sangat vital. Ketergantungan perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk Kapuas Hulu terhadap sistem perangkutan ini sangat tinggi.

Oleh karena pelayaran sungai sangat tergantung pada kondisi hidrologi wilayah, maka satu-satunya alternatif penanganan masalah ini adalah pengembangan jaringan jalan raya terutama di daerah-daerah pedalaman kecuali bila pemerintah mau mengendalikan penebangan dan perambahan hutan di hulu-hulu sungai besar sehingga fluktuasi debit air sungai dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, suatu usaha besar perlu dilakukan untuk mengembalikan siklus hidrologi pada kondisi yang wajar sehingga debit dan tinggi permukaan air sungai

relatif stabil sepanjang tahun. Bila hal ini sulit dilakukan, maka pemerintah perlu membangun jaringan jalan raya untuk mengurangi ketergantungan wilayah terhadap perangkutan sungai. Pengembangan sistem perangkutan jalan darat di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sudah sangat tepat yaitu dengan telah dikembangkannya prasarana jalan Lintas Selatan (Sintang-Putussibau) sebagai perpanjangan jalur arteri primer Pontianak–Sintang serta pengembangan prasarana jalan Lintas Utara dari Putussibau–Badau–Kabupaten Sintang. Kedua jalur regional ini melintasi kawasan pedalaman sebagai jawaban atas kelemahan sistem perangkutan sungai. Di musim kemarau, perangkutan sungai mengalami kendala untuk mencapai kawasan pedalaman, pergerakan barang dan penumpang dapat dilakukan melalui jalan darat. Konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan sistem perangkutan darat ini adalah perubahan terhadap struktur tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan, dimana perlahan namun pasti pada simpul-simpul strategis di sepanjang Jalan Lintas Selatan maupun Lintas Utara mulai tumbuh embrio pusat-pusat permukiman yang hampir dapat dipastikan kelak akan tumbuh menjadi pusat pelayanan bahkan pusat pertumbuhan regional baru. Bagaimanapun juga transportasi darat lebih diminati dan lebih menguntungkan daripada sistem angkutan sungai sehingga orientasi pergerakan dan orientasi perekonomian wilayah akan berubah sesuai pola jaringan jalan yang berkembang. Pusat permukiman di sepanjang Sungai Kapuas masih akan berkembang walaupun pada tingkat yang semakin rendah dan akan masih mengandalkan sistem transportasi sungai, karena di samping besarnya investasi dalam bentuk sarana dan prasarana sosial ekonomi telah ditanamkan di kawasan ini, belum semua pusat permukiman di sepanjang Sungai Kapuas ini memiliki akses tinggi ke jalur Lintas Selatan maupun Lintas Utara. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, tercatat panjang prasarana angkutan darat yakni berupa jalan kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sepanjang 998,59 km pada akhir tahun 2004 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 16,61% dari periode awal tahun 2000 yang sepanjang 856,35 km, dengan rincian jenis permukaan masing-masing 281,54 km berupa jalan aspal, 320,77 km jalan kerikil dan jalan tanah sepanjang 396,28 km. Sementara untuk jalan provinsi tercatat sepanjang 231,44 km yang merupakan sebagian dari ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Sintang dan Putussibau, yang lebih

dikenal dengan Lintas Selatan. Jalan Kabupaten yang sebagian besar masih berupa jalan tanah (40%) umumnya masih dalam kondisi rusak dan rusak berat (76%). Hanya sekitar 0,05% atau 0,5 km jalan kabupaten ini berada dalam kondisi baik, sedangkan sisanya sepanjang 237,26 km atau 23,76% dalam kondisi sedang. Jika dibandingkan dengan kondisi jalan pada tahun 2002-2003 sebelumnya, terlihat peningkatan panjang ruas jalan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas jalan itu sendiri. Contoh kondisi jalan baik yang tercatat pada tahun 2002 masih sepanjang 229,58 km namun pada tahun 2003 hanya tercatat sebesar 0,5 km saja yang artinya mengalami penurunan kualitas jalan hampir 99,8%. Hal ini cukup mengindikasikan bahwa jaringan jalan darat yang ada saat ini, secara kualitas belum berperan besar dalam menunjang mobilitas penumpang dan barang, baik lokal maupun antar kabupaten. Jalan-jalan yang beraspal dan kondisi baik umumnya baru terdapat pada jaringan jalan dalam kota- kota utama, seperti Putussibau dan Semitau. Selain jaringan jalan, tercatat pula jumlah jembatan yang dibangun di sepanjang jalan kabupaten Kapuas Hulu hingga periode akhir tahun 2004 adalah sepanjang 4.305 meter dengan jumlah fisik jembatan lebih kurang 260 buah (meningkat sebanyak 7 jembatan dibanding tahun 2000) yang berlokasi di sekitar 25 ruas jalan kabupaten yang ada. Jumlah jembatan saat ini yang dalam kondisi baik dan layak dilalui adalah sebanyak 177 jembatan atau sekitar 68% dari total keseluruhan jembatan yang ada, selebihnya tercatat kondisinya sedang, rusak dan rusak berat. Adapun nilai keseluruhan jembatan ini, sekitar Rp 74.533.530.838,00 (data Neraca Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2003). Untuk sarana angkutan jalan darat berupa kendaraan bermotor, tercatat pada tahun 2003 mengalami kenaikan, yakni sebanyak 5.902 unit pada tahun 2003, naik sebesar 26,8% dari tahun 2002 yang tercatat sejumlah 4.654 unit kendaraan. Jenis kendaraan yang paling banyak ditemukan adalah jenis kendaraan sepeda motor yang pada tahun 2003 terdapat sebanyak 5.178 unit (88%). Jenis angkutan umum di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2003, terbanyak dari jenis kendaraan pick up (356 unit) dan Mikro Bus sebanyak 142 unit. Selain itu terdapat jenis angkutan umum lainnya, seperti oplet (69 unit), bus (63 unit) dan jenis kendaraan truk (29 unit). Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah terminal di Kabupaten Kapuas Hulu hingga tahun 2004 tercatat sebanyak 6 terminal atau

bertambah 4 unit dibanding tahun 2000 yang berjumlah 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Putussibau dan Kedamin. Dengan penambahan tersebut, saat ini fasilitas terminal angkutan darat sudah dapat ditemukan di Kecamatan Badau, Batang Lupar, Semitau dan Kecamatan Suhaid selain di kedua kecamatan yang telah disebutkan sebelumnya. Sub sistem perhubungan udara di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini hanya dilayani oleh prasarana penerbangan komersial Bandara Pangsuma Putussibau yang merupakan pelabuhan udara perintis, dengan perusahaan penerbangan yakni Dirgantara Air Service (DAS) dan Merpati yang melayani jalur penerbangan Putussibau-Pontianak. Pada tahun 2003, jumlah sarana angkutan udara berupa pesawat terbang yang berangkat dan datang melalui Pelabuhan Pangsuma Putussibau tercatat sebanyak 187 penerbangan. Angka ini mengalami penurunan sebesar 6,50% dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data penumpang yang berangkat dan datang, masing-masing sebanyak 4.196 orang dan 3.740 orang yang berarti mengalami kenaikan dibanding tahun 2002 yang masing-masing tercatat sebanyak 1.425 dan 1.402 orang. Peningkatan dari jumlah penumpang ini disebabkan oleh karena jenis pesawat yang beroperasi pada jalur Putussibau-Pontianak berbeda dari tahun sebelumnya, yakni pesawatnya dari jenis yang lebih besar sehingga daya tampungnyapun lebih banyak pula.

Secara umum, dilihat dari sistem transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa belum seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mendapat layanan jaringan transportasi yang baik. Jalur pelayaran sungai yang saat ini dianggap sebagai jalur yang memiliki akses paling tinggi dari dan ke bagian lain wilayah kabupaten merupakan wilayah yang digolongkan sebagai wilayah yang paling mudah dicapai. Apalagi bila jalur jalan darat Lintas Selatan dapat berfungsi baik maka wilayah jalur Sungai Kapuas ini akan menjadi semakin penting dan melebar ke arah Selatan. Tetapi untuk kondisi saat ini wilayah sekitar ruas jalan Lintas Selatan baru dapat digolongkan sebagai wilayah yang memiliki akses sedang karena ketergantungan wilayah ini terhadap wilayah jalur pelayaran Sungai Kapuas masih tinggi. Wilayah lain seperti jalur pelayaran Sungai Embaloh dan jalur jalan darat Putussibau - Tanjungkerja - Benua Martinus - Lanjak - Badau - Nanga Kantuk sampai ke perbatasan Kabupaten Sintang juga digolongkan sebagai wilayah dengan

aksesibilitas sedang. Sedangkan wilayah lain merupakan wilayah dengan aksesibilitas rendah yang umumnya sangat sulit dicapai baik melalui sungai maupun darat.

3.1.5.3 Sistem Pelayanan Komunikasi Dan Informasi

Lalu lintas berita, uang dan barang merupakan jaringan yang penting di setiap daerah, dimana bidang komunikasi ini memiliki jangkauan lebih luas terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi. Peningkatan penyelenggaraan serta pembangunan bidang komunikasi telah meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan serta memiliki fungsi sosial minimalisasi dan eliminasi terisolirnya daerah terpencil. Penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu didukung sarana prasarana pos dan giro serta telekomunikasi yang meliputi telepon, telex, faksimili dan telegram yang dikelola oleh Perum Pos-Giro dan Perumtel. Selain itu tercatat adanya pemancar stasiun relay TVRI di beberapa kecamatan sebagai media informasi audio visual, disamping juga berbagai media elektronik lain seperti radio serta media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, bulletin dan lain-lain yang mendukung kebutuhan masyarakat akan berita, informasi dan hiburan. Tahun 2003, banyaknya kapasitas sentral telekomunikasi meningkat 2,64% dari tahun 2002, yakni dari 1.290 menjadi 1.324 kapasitas sentral pada tahun 2003. Demikian juga sentral yang terisi meningkat 2,04% dari 1.276 menjadi 1.302 sentral yang terisi. Hal yang sama juga tercatat dari jumlah pelanggan yang secara keseluruhan jenis pelanggan mengalami peningkatan dari 1.276 pelanggan menjadi 1.302 pelanggan atau naik 2,04%. Dari kategori pelanggan, jumlah pelanggan terbesar tahun 2003 terdiri dari perumahan sebesar 741 pelanggan (turun 3,64% dari tahun 2002), bisnis sebesar 459 pelanggan, wartel (56), kios pon (26), dan dinas telkom dan sosial masing-masing 10 pelanggan. Tahun 2003 pelayanan pos dan giro di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dilayani melalui fasilitas-fasilitas berupa 1 unit kantor pos utama di Kota Putussibau, 12 unit kantor pos pembantu di 12 Ibukota Kecamatan dan 5 unit pos desa di desa Sibau Hulu, Bika, Nanga Suruk, Sejiram dan Nanga Dangkan. Pada tahun 2003 banyaknya pengiriman dan penerimaan surat, paket pos maupun wesel di kantor pos di Kabupaten Kapuas Hulu tercatat 122.967 atau mengalami

penurunan 19,7% dari tahun 2002 sebelumnya, dengan nilai Rp 3.431.871.467,- yang dihitung dari nilai pengiriman surat dan paket pos, nilai penjualan benda pos dan bea wesel pos serta nilai pengiriman dan penerimaan wesel pos. Nilai ini juga mengalami penurunan sebesar Rp 205.219.563,- dibanding tahun 2002. Sebagai sarana audio visual, keberadaan sarana televisi di Kabupaten Kapuas Hulu sudah merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting terutama dalam hal pengetahuan dan penyebaran terhadap berita, informasi dan hiburan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 1982 telah membangun dan mengoperasikan pemancar stasiun relay TVRI di beberapa kecamatan di Kapuas Hulu. Salah satunya adalah pemancar yang dibangun di Semitau yang dibangun tahun 1999 dengan kekuatan pemancar sebesar 1000 Watt.

Pemancar ini dibangun untuk melengkapi keberadaan pemancar lain yang telah dibangun sebelumnya, yakni pemancar yang berlokasi di Putussibau dengan kekuatan pemancar 100 Watt yang merupakan pemancar stasiun relay pertama dibangun yaitu tahun 1982. Kemudian pemancar dengan kekuatan 10 Watt yang dibangun di Nanga Badau dan Nanga Tepuai pada tahun 1992 dan 1994. Beberapa prasarana komunikasi dan informasi juga tercatat di kabupaten Kapuas Hulu selain yang telah disebutkan di atas, yakni Balai Penerangan sebanyak 2 buah, Pos Penerangan Pedesaan sebanyak 43 buah, Pusat Informasi Pesantren 23 buah serta pembinaan Kelompok Pencapaian sebanyak 124 buah.

3.1.5.4 Sistem Pelayanan Energi

Meningkatnya kegiatan pembangunan di sektor industri, memberikan dampak berupa peningkatan terhadap permintaan tenaga listrik. Sebagai upaya pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga listrik tersebut, perlu mendapat perhatian yang serius terutama mencari alternatif sumber tenaga listrik seperti upaya pemanfaatan bahan mineral sebagai sumber utama yang dapat menghasilkan energi listrik. Kebutuhan listrik Kabupaten Kapuas Hulu dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan non-PLN. Sampai tahun 2003, semua Ibukota Kecamatan terjangkau pelayanan listrik negara, terdiri dari 1 sumber listrik ranting yang berlokasi di Putussibau, 4 sub ranting serta 19 dilayani melalui listrik desa. Semua kecamatan dilayani dengan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas antara

40 -100 KW kecuali Putussibau dengan kapasitas terpasang 9.954 KW yang memiliki kapasitas mampu 7.192 KW dan beban puncak 4.918 KW. Data energi listrik yang diperoleh dari PLN ranting Putussibau tahun 2003, jumlah produksi keseluruhan sumber listrik mencapai 21.112.061 KWH dengan pelanggan mencapai 16.682 pelanggan (naik 6,80% dari tahun sebelumnya). Jumlah ini relatif lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan 3 tahun sebelumnya. Dilihat perkembangan jumlah pelanggan dari tahun 1999-2003 maka peningkatan jumlah pelanggan listrik meningkat rata-rata 6,07% pertahun. Seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan, produksi listrikpun mengalami peningkatan dengan laju rata-rata 13,97% pertahun. Sementara energi listrik yang terjual juga mengalami peningkatan sebesar 9,45% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan listrik masih tinggi. Akan tetapi bila energi listrik yang terjual mengalami peningkatan dengan laju yang lebih rendah daripada laju peningkatan jumlah produksi, berarti efisiensi produksi listrik di Kapuas Hulu semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal ini juga diperkuat dengan besarnya tingkat kebocoran listrik yang meningkat 54.33% pertahun bahkan angka kebocoran ini sudah berada diatas 10% setiap tahunnya khususnya pada tahun 2002 dan 2003 yang cenderung meningkat persentasenya terhadap produksi total. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah merencanakan beberapa pembangkit listrik tenaga air dan uap, salah satunya berada di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu di Nanga Silat. Pembangkit listrik ini menggunakan tenaga air yang menghasilkan energi listrik sebesar 21 MW.

Dengan adanya pembangkit listrik tenaga air, maka wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bagian Barat akan dapat terlayani melalui sumber ini. Sedangkan pembangkit tenaga diesel dapat dialihkan ke daerah Timur yang cukup sulit dicapai oleh jaringan transmisi pembangkit tenaga air tersebut. PLN telah menempatkan beberapa tenaga, baik tenaga teknis maupun non teknis yang berjumlah 143 orang pada tahun 2004. Dari 143 pegawai PT PLN tersebut, 114 merupakan tenaga teknis yang selalu siap melayani berbagai kerusakan atau keluhan masyarakat berkaitan dengan sistem jaringan kelistrikan yang terpasang. Seperti halnya sumber energi listrik, hal yang sama terjadi pula pada pelayanan kebutuhan bahan bakar, terutama minyak tanah, premium dan solar yang permintaan dan pemakaiannya meningkat

tiap tahunnya. Pada tahun 2004, Pertamina Unit Pemasaran VI Cabang Pontianak telah mencatat besarnya pendistribusian bahan bakar minyak ke wilayah Kapuas Hulu, yakni 8.137.000 liter bahan bakar premium, 6.598.000 liter solar dan 10.848.000 liter minyak tanah.

3.1.5.5 Sistem Pelayanan Air Bersih

Seperti halnya kebutuhan energi listrik dan bahan bakar, hal serupa terjadi pada kebutuhan air bersih yang mengalami peningkatan akibat dampak dari peningkatan kegiatan pembangunan di sektor industri. Sistem pelayanan sarana air bersih di Kapuas Hulu hingga tahun 2004 dikelola oleh 1 perusahaan Air Minum (PDAM) dengan sumber air baku dari air sungai yang menjangkau Kota Putussibau sebagai Ibukota Kabupaten dan beberapa kecamatan. Penduduk lainnya di kota-kota kecamatan menggunakan air Sungai Kapuas sebagai sumber air utama untuk keperluan sehari-hari disamping juga mengandalkan air hujan dan menggunakan air tanah dengan membuat sumur-sumur dangkal. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu mengandalkan sumber air minum yang berasal dari sungai Kapuas, yakni hampir 70% dari seluruh penduduk di Kapuas Hulu. Sementara pemanfaatan sumber air ledeng yang dikelola PDAM hanya sebesar 19,37% dari seluruh jumlah penduduk yang membutuhkan air minum. Perusahaan pengelola air minum yang ada saat ini menggunakan sumber air baku (air sungai Kapuas) yang kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk mendapatkan kualitas air minum yang terjamin kemurnian dan hygienisnya untuk didistribusikan kepada masyarakat berupa air bersih dan air minum. Tahun 2003, jumlah pelanggan yang terlayani jaringan air bersih dari saluran pipa air PDAM adalah 4.793 pelanggan dan terjadi peningkatan sebesar 9,78% dibanding tahun 2002 yang tercatat 4.366 pelanggan. Selain itu, tercatat sebaran pelayanan penyaluran air minum berdasarkan jenis pelanggannya. Rumah tempat tinggal tercatat 4.265 pelanggan (naik 10,86% dari tahun sebelumnya), pelanggan perusahaan dan pertokoan mengalami kenaikan 7,17%. Sedangkan badan-badan sosial tetap 2 pelanggan, hotel bertambah 1 menjadi 4 pelanggan, rumah ibadah 85 pelanggan (naik 7,59%), tempat-tempat umum sebanyak 40 pelanggan (turun 2,44%), instansi pemerintah naik 9,72% menjadi 79 pelanggan dan lain-lain bertambah 3 menjadi 4 pelanggan. Produksi air bersih yang disalurkan kepada pelanggan untuk tahun 2003 adalah sebanyak

1.390.171 m³ yang berarti mengalami peningkatan sebesar 39,60% dari tahun 2002. Peningkatan volume air yang disalurkan termasuk diantaranya peningkatan kebocoran sebanyak 349.226 m³. Besarnya pendapatan air minum yang disalurkan tahun 2003 sebesar Rp 1.333.731.000,- (meningkat sebesar 63,79%) dari tahun 2002 yang pendapatannya sebesar Rp 814.292.000,-.



BAB IV

TINJAUAN TEORI PERANCANGAN

4.1 Tinjauan Tata Ruang Luar dan Ruang Dalam

4.1.1 Ruang Luar

1. Definisi dan Batasan Ruang Luar

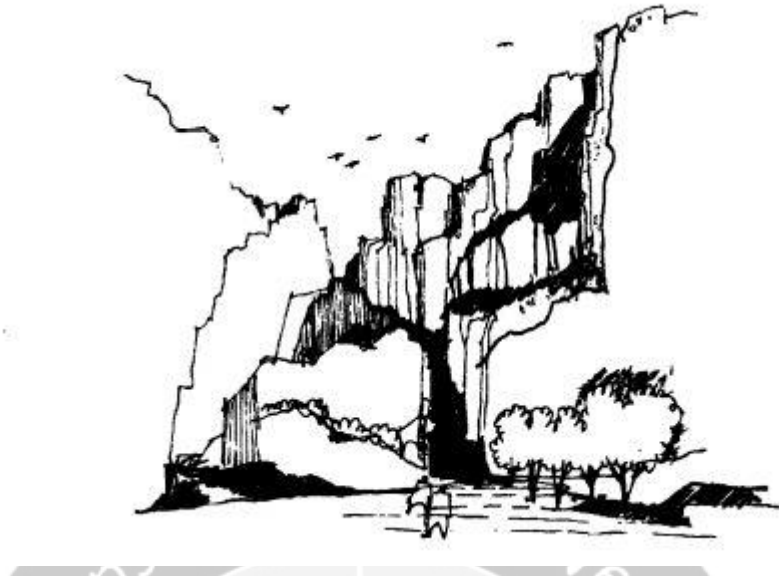
Yoshinobu Ashihara (1974) dalam buku Dyan Surya Merancang Ruang Luar (terjemahan) menyatakan ruang luar ialah ruang yang terjadi dengan membatasi alam. Ruang luar dipisahkan dari alam dengan memberi frame, atau batasan tertentu, bukanlah alam itu sendiri yang meluas sampai tak terhingga. Ruang luar juga berarti sebagai lingkungan luar buatan manusia dengan maksud tertentu. Pada ruang luar elemen atap dianggap tidak ada, karena mempunyai batas yang tak terhingga, maka perencanaan dan perancangan ruang luar biasa disebut dengan arsitektur tanpa atap²⁶.

Prabawasari dan Suparman dalam bukunya “Tata Ruang Luar 1” menyatakan ruang luar adalah²⁷ :

- Ruang yang terjadi dengan membatasi dalam hanya pada bidang alas dan dindingnya, sedangkan atapnya dapat dikatakan tidak terbatas.
- Sebagai lingkungan luar buatan manusia, yang mempunyai arti dan maksud tertentu dan sebagai bagian dari alam.
- Arsitektur tanpa atap, tetapi dibatasi oleh dua bidang : lantai dan dinding atau ruang yang terjadi dengan menggunakan dua elemen pembatas. Hal ini menyebabkan bahwa lantai dan dinding menjadi elemen penting didalam merencanakan ruang luar.

²⁶ Ashihara, Yoshinobu, 1970, Exterior Design in Architecture, Van Nostrand Reinhold, New York.

²⁷ http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/index-tata_ruang_luar_1.htm, diakses : 15 Nov. 19, pukul 02:48 WIB

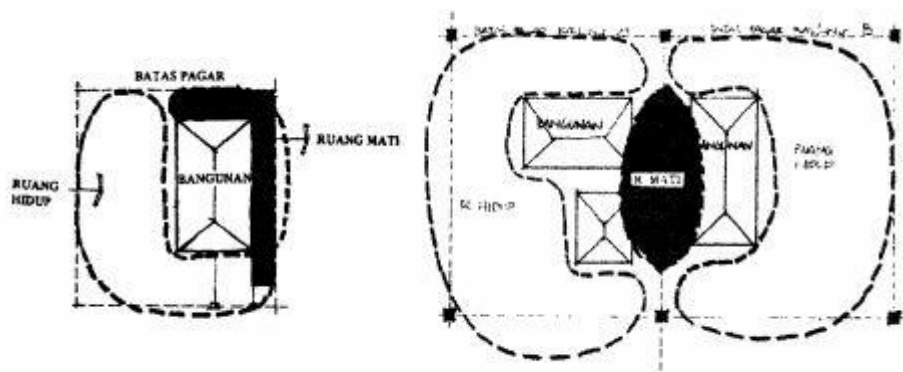


Gambar 4. 1 Ruang yang dibatasi oleh elemen alam

Sumber : Prabawasari dan Suparman, Tata Ruang Luar 1

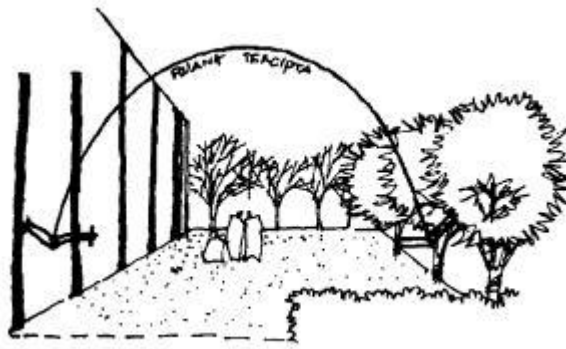
2. Elemen Pembatas Ruang Luar

Elemen pembatas ruang luar adalah batasan area site dengan area luar site. Pembatas dapat berupa ruang hidup atau ruang mati. Ruang hidup adalah ruang yang terstruktur dan mempunyai fungsi serta hubungan yang jelas dengan ruang di sekitarnya. Sedangkan ruang mati adalah ruang yang tercipta tanpa direncanakan.



Gambar 4. 2 Ruang Hidup dan Ruang Mati

3. Elemen Pengisi Ruang Luar



Gambar 4. 3 Ruang yang dibatasi oleh bangunan dan tanaman buatan manusia

4.1.2 Ruang Dalam

1. Definisi dan Batasan ruang Dalam

Ruang dalam merupakan wadah yang digunakan manusia untuk beraktivitas. Ruang dalam terbentuk dari pembatas-pembatas yang ada di dalam bangunan. Terbentuknya ruang dalam melalui elemen-elemen pembatasnya, sedangkan ruang-ruang pergerakan atau sirkulasi dalam ruang dalam terbentuk melalui elemen pengisinya. Dalam mencapai kualitas ruang dalam yang baik, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang terbentuk melalui pembatas, pengisi, dan pelengkap ruang yang mencakup ukuran ruang, bentuk ruang, kualitas lingkungan ruang, dan isi ruang.

2. Elemen Pembatas Ruang Dalam

Elemen pembatas ruang dalam merupakan semua elemen yang dapat membentuk pelingkup ruang. Pembatas utama ruang dalam meliputi : struktur, dinding pembatas, sudut-sudut dinding, pintu, jendela, atap, plafond, partisi, dan permukaan lantai. Elemen pembatas ruang mempunyai dua fungsi, fungsi utamanya, yaitu :

- Pencegahan penetrasi polusi udara, suara, cahaya, penghawaan, dan debu.
- Seleksi transmisi faktor lingkungan (cahaya, pemandangan, suara).
- Mendefinisikan wilayah.

- Keamanan (kebakaran, binatang buas, bahaya alam, manusia dan mesin)

Fungsi ke dua dari elemen pembatas ruang, yaitu :

- Pendukung struktur bangunan.
- Tempat memasang elemen pelengkap.
- Tempat meletakkan elemen pengisi.

Karakter penentu bentuk elemen pembatas ruang meliputi : pengaliran udara, biaya, umur pemakaian, ketahanan terhadap api, fleksibilitas, tingkat kesulitan perawatan, kualitas opsi, tingkat penetrasi manusia, kemampuan membawa elemen pelengkap, bentuk, kualitas suara, kekuatan konstruksi, kualitas permukaan, konduktivitas termal, ketahanan terhadap air, berat massa material.

3. Elemen Pengisi Ruang Dalam

Elemen pengisi ruang dalam dapat berupa perabot-perabot, peralatan atau mesin, dan tanaman. Elemen pengisi ruang dalam menunjang aktivitas yang diwadahi dalam ruang. Untuk menentukan jenis elemen pengisi ruang dalam dipengaruhi oleh beberapa karakter. Karakter penentu elemen pengisi ruang dalam antara lain :

- Karakter pengguna
- Karakter aktivitas
- Karakter elemen pelingkup ruang

4.2 Tinjauan Arsitektur Neo Vernakular

4.2.1 Pengertian Arsitektur Neo Vernakular

Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang berkembang pada era Post Modern yaitu aliran arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960, Post Modern lahir disebabkan pada era Modern timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan monoton (bangunan berbentuk kotak-kotak). Oleh sebab itu, lahirlah aliran-aliran baru yaitu Post

Modern²⁸. Arsitektur Neo Vernakular adalah arsitektur yang berusaha mengangkat nilai-nilai lokalitas yang ada di suatu tempat tertentu dengan cara memadukan unsur sosial budaya, sejarah dan kearifan lokal yang ada dengan perkembangan arsitektur yang baru sehingga karakter atau jiwa suatu tempat akan tetap lestari.

Desain arsitektur ini tak hanya menerapkan bentuk baru dari elemen-elemen fisiknya, namun juga harus mampu menyesuaikan diri terhadap iklim, material dan adat istiadat yang berkembang di daerah setempat. Sehingga, setiap desain memiliki keunikan yang tersendiri tergantung dari keadaan kawasan sekitar.

Arsitektur Neo Vernakular berasal dari kata Neo dan Vernakular. Neo merupakan adaptasi dari bahasa Yunani, yang berfungsi sebagai fonim yang memiliki arti yang baru. Sedangkan Vernakular adalah arsitektur yang berasal dari budaya setempat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Oleh sebab itu, arti dari Arsitektur Neo Vernakular adalah arsitektur yang menerapkan elemen arsitektur yang sudah ada baik berupa bentuk fisik yang berkaitan dengan tata rupa, tata masa, tata ruang, konstruksi dan bentuk non fisik yang berkaitan dengan kepercayaan, tradisi, budaya, konsep dan filosofi yang diperbaharui menjadi suatu karya baru, lebih modern tanpa menghilangkan lokalitas setempat.

4.2.2 Sejarah Arsitektur Neo Vernakular

Arsitektur Neo Vernakular merupakan salah satu bagian dari aliran Arsitektur Post Modern yang lahir sebagai tanggapan akan dominasi trend desain rasionalisme dan fungsionalisme yang muncul oleh karena revolusi industri yang terjadi di Eropa. Pada masa itu, gaya desain bangunan yang berkembang lebih mengutamakan pada aspek bagaimana bangunan dapat mewedahi aktivitas dari perilaku, bagaimana menciptakan bangunan yang fungsional dan rasional yang maksudnya masuk diakal, tidak berlebihan, sehingga bangunan terkesan mengabaikan nilai-nilai seni dan nilai tradisi yang berkembang di wilayah setempat.

Arsitektur Neo Vernakular berusaha menyelaraskan diri dengan alam dan lingkungan, mengakomodasi nilai-nilai filosofis, kosmologis, serta peran budaya

²⁸ Indri Yermia Wehelmina Maloring, E-Jurnal Re-Design Taman Budaya Sulawesi Utara di Manado "*Neo-Vernacular Architecture*", Universitas Sam Ratulangi. Manado, hal. 35, diakses : 15 November 2019

lokal yang berkembang di masyarakat dan mewujudkannya dalam bentuk bangunan baru yang memiliki jiwa alam setempat. Arsitektur Neo Vernakular menerapkan konsep-konsep lokal yang dikemas dalam bentuk yang modern. Ide bentuk diperoleh dari Arsitektur Vernakular setempat namun ditransformasikan dalam bentuk yang baru.

Karena Arsitektur Neo Vernakular merupakan aliran yang masuk dalam Arsitektur *Post-modern*, maka karakteristik arsitektur ini menurut Heinrich Klotz²⁹ dibagi menjadi 10 butir karakteristik, yaitu :

1. Regionalism

Mengacu kepada gaya regional atau setempat untuk menggantikan gaya internasional yang telah masuk dan berkembang.

2. Fictional Figurative

Bermain-main dengan figur bangunan untuk memberikan kesan yang beragam.

3. Fictional

Mengapresiasikan arsitektur sebagai sebuah karya seni dan menuangkannya dalam suatu bangunan.

4. Communicative

Memiliki banyak arti dalam suatu wadah bangunan dan berkesan komunikatif kepada pengguna.

5. Imaginative

Menggambarkan imajinasi dunia dalam suatu bangunan yang akan dibangun.

6. No – Sterile

Menentang paham steril dalam suatu bangunan.

7. Historism

²⁹ Ir. Wahyu Prastowo, "Aliran Post-Modern", Diktat Perkembangan Arsitektur 3, (hal 11)

Dikuasai oleh kenangan dalam sebuah bangunan yang tergambarkan melalui kesan dan pesan yang dituangkan.

8. Contextual

Kontekstual dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar (fisik dan non fisik), serta menghargai ungkapan individual atau personal.

9. No – Single Style

Menghindari langgam tunggal dan mengembangkan vokabulari langgam dan bentuk dalam penerapannya.

10. Fiction = Function

Fiksi dapat juga berarti fungsi dari suatu bangunan.

Arsitektur Post Modern merupakan arsitektur yang berkembang setelah masa Arsitektur Modern dan Late Modern. Arsitektur ini berkembang pada pertengahan abad ke 19 atau sekitar tahun 1960an. Menurut Charles Jencks dalam bukunya *Late-Modern and Other Essay*, terdapat 29 perbedaan yang dapat dilihat antara langgam pada Arsitektur Modern, Late Modern dan Post Modern, yaitu sebagai berikut³⁰ :

³⁰ Charles Jencks, *Late-Modern Architecture and Other Essays* (New York : Rizolli, 1980), hal.32.

	MODERN (1920-1960)	LATE MODERN (1960-)	POST-MODERN (1960-)
IDEOLOGICAL			
1	One International style, or 'no style'.	Unconscious style	Double-coding of style
2	Utopian and idealist	Pragmatic	'Popular' and pluralist
3	Deterministic form, functional	Loose fit	Semiotic form
4	Zeitgeist	Late-Capitalist	Traditions and choice
5	Artist as prophet/healer	Suppressed artist	Artist/client
6	Elitist/for 'everyman'	Elitist professional	Elitist and participative
7	Wholistic, comprehensive redevelopment	Wholistic	Piecemeal
8	Architect as saviour/doctor	Architect provides service	Architect as representative and activist
STYLISTIC			
9	'Straightforwardness'	Supersensualism/Silk-Tech/High-Tech	Hybrid expression
10	Simplicity	Complex simplicity-oxymoron: ambiguous reference	Complexity
11	Isotropic space (Chicago frame, Domino)	Extreme isotropic space (open office planning: 'shed space') redundancy and flatness	Variable space with surprises
12	Abstract form	Sculptural form, hyperbole, enigmatic form	Conventional and abstract form
13	Purist	Extreme repetition and purist	Eclectic
14	Inarticulate 'dumb box'	Extreme articulation	Semiotic articulation
15	Machine aesthetic, straightforward logic, circulation, mechanical, technology and structure	2nd Machine Aesthetic extreme logic, circulation, mechanical, technology and structure	Variable mixed aesthetic depending on context: expression of content and semantic appropriateness towards
16	Anti-ornament	Structure and construction as ornament	Pro-organic and applied ornament
17	Anti-representational	Re-present logic, circulation, mechanical, technology and structure frozen movement	Pro-representation
18	Anti-metaphor	Anti-metaphor	Pro-metaphor
19	Anti-historical memory	Anti-historical	Pro-historical reference
20	Anti-humour	Unintended humour, malapropism	Pro-humour
21	Anti-symbolic	Unintended symbolic	Pro-Symbolic
DESIGN IDEAS			
22	City in park	'Monument' in park	Contextual urbanism and rehabilitation
23	Functional separation	Functions within a 'shed'	Functional mixing
24	'Skin and bones'	Slick skin with Op effects wet look distortion, sfumato	'Mannerist and baroque'

Tabel 4. 1 Perbedaan Arsitektur Modern, Late Modern dan Post Modern

Sumber : Charles Jencks, Late-Modern Architecture and Other Essays, 1980

4.2.3 Prinsip Desain

Adapun beberapa prinsip desain Arsitektur Neo Vernakular secara terperinci, yaitu :

1. Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang. Bangunan harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Bangunan baru harus mampu mengakomodasi fungsi dan aktivitas pelaku yang ada.
2. Hubungan Abstrak, meliputi interpretasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat

dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur.

3. Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterpretasikan lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim.
4. Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep arsitektur.
5. Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi yang akan datang.

4.2.4 Kriteria Arsitektur Neo Vernakular

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi Arsitektur Neo Vernakular adalah:

1. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen).
2. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non fisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan.
3. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan visualnya).

4.2.5 Perbedaan Arsitektur Tradisional, Vernakular dan Neo Vernakular

Arsitektur Neo Vernakular memiliki perbedaan dengan Arsitektur Vernakular maupun tradisional. Arsitektur yang sama-sama mengangkat nilai tradisi ini memiliki beberapa perbedaan yang menyangkut pada banyak hal, terkait pada prinsip, ide bentuk dan tujuannya.

Menurut	Tradisional	Vernakular	Neo Vernakular
Definisi dan Tujuan	Arsitektur yang menyimbolkan budaya suatu bangsa dengan beberapa atribut yang melekat dengannya.	Merupakan pengembangan dari arsitektur rakyat, memperhatikan atau dipengaruhi iklim, lingkungan, dan kondisi budaya masyarakat setempat.	Arsitektur yang tidak secara utuh menerapkan kaidah-kaidah vernakular, tetapi mencoba menampilkan ekspresi visual seperti bangunan vernakular yang lebih modern.
Ideologi	Terbentuk secara turun-temurun dari kondisi sosial budaya dan kultur yang ada pada suatu wilayah.	Terbentuk dari tradisi turun-temurun tetapi terdapat pengaruh dari luar.	Menerapkan elemen arsitektur yang sudah ada dan kemudian mengalami pembaruan menuju suatu karya yang modern.
Prinsip	Tertutup pada perkembangan, memiliki pakem-pakem yang tidak bisa dirubah untuk mempertahankan keasliannya.	Berkembang setiap waktu untuk merefleksikan lingkungan, budaya dan sejarah dari daerah dimana arsitektur tersebut berada.	Bertujuan melestarikan unsur-unsur lokal sehingga bentuk dan sistemnya berkaitan dengan iklim setempat, seperti penghawaan, pencahayaan alamiah.
Ide Desain	Lebih mementingkan fasad atau bentuk, ornamen sebagai suatu keharusan.	Ornamen-ornemen pelengkap, tidak meninggalkan nilai-nilai setempat tetapi dapat melayani aktifitas masyarakat di dalam.	Bentuk desain lebih modern.

Tabel 4. 2 Tabel Perbedaan Arsitektur Tradisional, Vernakular dan Neo Vernakular

4.2.6 Ciri-ciri Arsitektur Neo Vernakular

Menurut Charles Jencks dalam bukunya *Language of Post-Modern Architecture* (1986), Arsitektur Neo Vernakular memiliki karakteristik desain sebagai berikut :

- Menggunakan atap bubungan.
- Penggunaan elemen konstruksi lokal seperti batu bata.
- Penggunaan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal.
- Adanya interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan.

- Warna-warna yang kuat dan kontras.

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo Vernakular tidak ditujukan pada Arsitektur Modern maupun Arsitektur Tradisional. Arsitektur ini merupakan hasil sintesa dari kedua gaya arsitektur tersebut. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur di atas ditujukan dengan jelas dan tepat oleh Arsitektur Neo Vernakular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian kembali bentuk-bentuk maupun nilai filosofis dan kosmologis suatu daerah namun dalam suatu desain yang baru.

Pada dasarnya, Arsitektur Neo Vernakular berusaha untuk mendapatkan unsur-unsur arsitektur yang baru. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan pencampuran antara unsur setempat dengan perkembangan temuan-temuan dalam konstruksi maupun desain arsitektur, namun diwujudkan dalam suatu desain baru yang masih mempertimbangkan nilai-nilai tradisi dan budaya setempat. Cara ini diharapkan mampu membuat seni desain dalam membangun terus berkembang namun juga memunculkan dan menguatkan unsur-unsur tradisi yang ada pada daerah setempat sehingga tetap terjaga dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta Heri P, d. (2011). *Menahan serbuan pasar modern strategi perlindungan dan pengembangan pasar tradisional*. Yogyakarta : Ombudsman swasta DIY
- Azimah, Dewi, *Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Fisip Undip, Semarang, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017*.
- Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Charles Jencks, *Late-Modern Architecture and Other Essays* (New York : Rizolli, 1980).
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan, Data Base Pertanian, 2017.
- Ibid.,
- Indri Yermia Wehelmina Maloring, E-Jurnal Re-Design Taman Budaya Sulawesi Utara di Manado “*Neo-Vernacular Architecture*”, Universitas Sam Ratulangi. Manado, hal. 35, diakses : 15 November 2019
- Ir. Wahyu Prastowo, “Aliran Post-Modern”, Diktat Perkembangan Arsitektur 3.
- Keputusan Menteri Kesehatan. (2008). Nomor 59 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat*
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2011). *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011*.
- Nisa, Runis, *Observasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. (2011). *Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*
- Peraturan Presiden Reublik Indonesia no. 112 th. 2007
- RPJM kabupaten Kapuas Hulu. (2013). Tahun 2013 – 2018 *tentang gambaran Umum Kondisi Daerah*
- S, Bintoro, 2016. *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul.* Yogyakarta : universitas Atma Jaya
- Setiawan, Yoga, *Gambaran Umum Pasar Tradisional.*
- Standar Nasional Indonesia 8152:2015. (2015). *Pasar Rakyat*
- Waluyo, Hari, *Sosialisasi Pasar Tradisional Sebagai Aset Wisata Budaya di Lampung.*
- Yoshinobu, Ashihara, 1970, *Exterior Design in Architecture*, Van Nostrand Reinhold, New York.